

e-news letter

FEB | 2020

PKSPARLEMEN

KREATIF, AKTIF, KONSTANTIF

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. Abdul Kharis A, SE, M.Si, Akt

EVAKUASI SEGERA WNI DI WUHAN

ANTAR

www.antarnews.com

Saving Private Indonesian

Melakukan evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) di Wuhan memang ibarat misi dalam film Saving Private Ryan. Tentang sebuah keputusan "manusiawi" entitas Negara yang memulangkan satu orang James Ryan dengan mengirim delapan orang prajurit, hanya untuk menenangkan hati seorang ibu.

Saving Private Ryan, salah satu film fenomenal garapan Steven Spielberg. Berkisah tentang delapan prajurit yang dipimpin Kapten John Miller (Tom Hanks) dalam menyelamatkan seorang prajurit bernama James Ryan (Matt Damon). Dalam sebuah scene awal Kapten John Miller menyampaikan mencari Ryan sama saja seperti mencari

jarum di tumpukan jarum, sulit membedakan satu sama lain. Film Saving Private Ryan mendapat 11 nominasi Oscar termasuk Best Picture dan memenangkan lima diantaranya.

Melakukan evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) di Wuhan memang ibarat misi dalam film Saving Private Ryan.

Tentang sebuah keputusan "manusiawi" entitas Negara yang memulangkan satu orang James Ryan dengan mengirim delapan orang prajurit, hanya untuk menenangkan hati seorang ibu.

Alhamdulillah, sejak sabtu dinihari 238 orang berhasil dibawa pulang dari Wuhan. Apresiasi kepada Pemerintah

dan segenap stakeholders yang telah berkhiantir menghadirkan kepastian. Setelah sekian waktu nampak gamang dan bimbang.

Fraksi PKS sempat menyanggah inisiatif Pemerintah yang telat, dengan alasan tidak ada akses. Padahal disaat bersamaan sejumlah negara sudah mengirimkan armada menjemput warga negara mereka.

Fraksi PKS dalam posisi oposisi mendorong dan mendukung penuh langkah Pemerintah memulangkan WNI dari Wuhan, karena pada dasarnya ruang kompetisi tidak boleh menghentikan nalar dan hati nurani demi NKRI. Karena langkah yang lelet dan lambat, hanya akan menimbulkan masalah yang menahun.

Tindakan pemerintah harus cepat dan tepat, tidak boleh terlambat dalam proses evakuasi WNI. Penyebaran virus corona sungguh luar biasa, yang awalnya terdeteksi di Wuhan kini telah menyebar ke hampir seluruh wilayah di China. Hingga Sabtu (1/2/2020) siang, virus corona sebanyak 244 kasus kematian dengan 11.000 kasus. Tidak cukup sampai disitu, kini suspect positif virus corona menyebar ke luar china dan lebih dari 25 negara diantaranya Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Australia, bahkan hingga Eropa dan Amerika. Atas kejadian ini, Organisasi Kesehatan Dunia

(WHO) telah merilis pernyataan darurat kesehatan global.

Pemerintah harus melakukan evakuasi yang cepat terhadap WNI yang ada di Wuhan agar bisa diselamatkan. Disisi lain proses evakuasi juga harus berlangsung cermat mulai dari pra evakuasi.

Pemerintah harus memastikan bahwa WNI yang akan di evakuasi steril dari virus Corona. Kemudian ketika sampai di Indonesia, lokasi karantina bagi mereka juga harus dipastikan meminimalisir kemungkinan penyebaran virus Corona ini. Hal ini penting agar tidak ada penyebaran virus Corona di Indonesia.

Kita bersyukur hingga hari ini virus corona belum ditemukan di Indonesia, meski luas wilayahnya dan banyaknya pintu masuk. Kewaspadaan tentu tidak boleh diabaikan, seraya proses evakuasi dilakukan. Pemerintah diamanatkan oleh konstitusi untuk menjalankan ketidaktunggalan, diantaranya menghadirkan kesejahteraan dan keadilan untuk semua tanpa membedakan apapun secara jumlah dan asal. Pun dalam proses evakuasi WNI di Wuhan. Menyayangi yang dekat, Mencintai yang jauh. Saving Private Indonesian

Humas Fraksi PKS DPR RI

Wakil Ketua Komisi I DPR Minta Segera Evakuasi WNI di Wuhan

Pemerintah harus siapkan kondisi terburuk seperti evakuasi dan karantina sesuai dengan SOP penanganan internasional dalam menghadapi virus ini, sehingga WNI yang dievakuasi harus dipastikan kesehatan dan keselamatannya sebelum sampai ke tanah air”

Dr. ABDUL KHARIS A, SE. M.Si.Akt

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Almasyhari meminta Kementerian Luar Negeri RI untuk segera mendesak Pemerintah Tiongkok membuka jalur evakuasi warga negara Indonesia yang saat ini masih berada di Wuhan dan sekitarnya.

Diketahui, WNI yang tercatat berada di wilayah Karantina total berjumlah 243 orang, mereka semua tersebar di 15 kota yang ada di Provinsi Hubei.

"Kemenlu segera desak pemerintah RRT (Republik Rakyat Tiongkok) agar bisa berikan pertimbangan dan saran tindakan evakuasi, sudah makin banyak korban, hari ini saja meningkat dua kali lipat

yang sebelumnya hanya 2000an menjadi 4000 lebih, dengan korban meninggal lebih dari 100 jiwa” jelas Kharis dalam keterangan tertulis kepada media Selasa (28/01).

Kharis menambahkan sudah belasan negara berupaya evakuasi warganya dari kawasan Virus Corona apabila memungkinkan para WNI ini bisa langsung dibawa ke Indonesia atau dievakuasi keluar dari wilayah karantina dan tetap berada di wilayah China.

“Pemerintah harus siapkan kondisi terburuk seperti evakuasi dan karantina sesuai dengan SOP penanganan internasional dalam menghadapi virus ini, sehingga

WNI yang dievakuasi harus dipastikan kesehatan dan keselamatannya sebelum sampai ke tanah air” terang anggota DPR RI Fraksi PKS ini.

Anggota DPR asal Solo ini mengapresiasi travel warning yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri hari ini ke Provinsi Hubei, Tiongkok, namun Kharis mengingatkan agar lebih baik diperluas bukan hanya Provinsi Hubei tapi juga ke semua wilayah karantina di Tiongkok khususnya dan Tiongkok umumnya kepada seluruh WNI agar sementara waktu kedepan untuk tidak berkunjung terlebih dahulu.

“Pemerintah Indonesia telah resmi mengeluarkan peringatan kunjungan atau travel warning bagi masyarakat untuk bepergian ke Provinsi Hubei, China, saya apresiasi namun saya minta travel warning ini di perluas ke seluruh wilayah karantina dan kalau perlu tunda dulu ke Tiongkok sampai pemerintah Tiongkok bisa memastikan dan menghentikan isolasi di sana dan juga menyatakan wilayah tersebut telah aman untuk dikunjungi,” tutup Kharis.

Foto : dpr.go.id



Toriq Hidayat: Pemerintah Harus Perhatikan Nasib WNI di Wuhan

Solusi terbaik adalah dengan segera mengevakuasi WNI dari Wuhan dan wilayah-wilayah yang rentan dengan penyebaran virus Corona. Kementerian Luar Negeri Indonesia harus proaktif memperhatikan keadaan mereka, evakuasi dengan segera”

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi 1 DPR RI

Jakarta (29/01) — Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat, Toriq Hidayat, mengingatkan Pemerintah untuk memperhatikan nasib Warga Negara Indonesia (WNI) di Wuhan, Tiongkok.

Menurut Toriq, hingga kini mereka masih terjebak di Wuhan, karena kota tersebut tengah diisolasi Pemerintah Tiongkok terkait wabah virus Corona.

“Pemerintah Indonesia harus memastikan kebutuhan warga Indonesia yang berada di

Wuhan, karena periode isolasi wabah Corona ini belum diketahui akan sampai kapan berlangsung” ujar Toriq dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/01/2020).

Kebutuhan dasar mereka, Lanjut Toriq, perlu tetap dipenuhi meskipun sedang dalam situasi yang tidak menentu.

“Pemerintah perlu secara intensif menjalin komunikasi dengan tiap-tiap individu mengenai kebutuhan mereka sehari-hari,” ujar anggota DPR

asal Daerah Pemilihan Jawa Barat 11 ini.

Jika kondisinya sudah memungkingkan, lanjut Toriq, sebaiknya mereka segera dipulangkan ke Indonesia saja.

“Solusi terbaik adalah dengan segera mengevakuasi WNI dari Wuhan dan wilayah-wilayah yang rentan dengan penyebaran virus Corona. Kementerian Luar Negeri Indonesia harus proaktif memperhatikan keadaan mereka, evakuasi dengan segera” pungkas anggota Fraksi

Partai Keadilan Sejahtera ini. Sebelumnya, virus Corona yang mewabah di Wuhan, Tiongkok saat ini mengakibatkan adanya upaya isolasi kota tersebut.

Dengan demikian, ruang gerak 93 WNI yang saat ini berada di sana menjadi sangat terbatas. Melonjaknya harga bahan makanan juga semakin menyulitkan mahasiswa asal Indonesia di Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.



DPR RI: Evakuasi WNI harus Cepat dan Cermat

Pemerintah harus memastikan bahwa WNI yang akan di evakuasi steril dari virus Corona. Kemudian ketika sampai di Indonesia, lokasi karantina bagi WNI juga harus dipastikan meminimalisir kemungkinan penyebaran virus Corona ini. Hal ini penting agar tidak ada penyebaran virus Corona di Indonesia

H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (31/01) — Pemerintah Indonesia harus berhati-hati dalam proses evakuasi dan penanganan WNI kembalinya di Indonesia agar virus tidak menyebar di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan secara tertulis Jumat, (31/01/2020) oleh Sukamta, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS.

Sukamta menyatakan bahwa rencana pemerintah evakuasi WNI Indonesia harus dilakukan dengan cepat dan cermat.

"Data resmi yang dirilis oleh 22 negara yang telah menemukan pasien terinfeksi virus Corona per 31 Januari

terdapat 9.817 kasus dengan 214 korban jiwa. Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand telah merilis bahwa terdapat virus Corona di negaranya. Praktis hanya Indonesia yang belum ditemukan kasusnya. Kita berharap upaya-upaya preventif yang ketat kepada WNA yang masuk ke Indonesia khususnya yang berasal dari China atau yang pernah berinteraksi dengan kota Wuhan dan Provinsi Hubei," ujar Sukamta.

Pemerintah Indonesia, lanjut Sukamta, juga harus melakukan evakuasi yang cepat agar WNI Indonesia yang sedang di Wuhan bisa diselamatkan. Sedangkan evakuasi juga berlangsung cermat mulai dari pra evakuasi WNI.

"Pemerintah harus memastikan bahwa WNI yang akan di evakuasi steril dari virus Corona. Kemudian ketika sampai di Indonesia, lokasi karantina bagi WNI juga harus dipastikan meminimalisir kemungkinan penyebaran virus Corona ini. Hal ini penting agar tidak ada penyebaran virus Corona di Indonesia," ujar anggota DPR RI Dapil DI Yogyakarta ini.

Hingga saat ini menurut Sukamta, ilmuwan-ilmuwan dunia belum menemukan bagaimana virus ini menyebar dan kapan fase virus ini bisa menular ke orang yang belum terjangkit.

"Apalagi tanda-tanda awal proses inkubasi virus juga masih belum bisa dipastikan. Sehingga bisa saja orang yang terlihat sehat namun ternyata di dalam tubuhnya telah ada virus Corona," papar Sukamta.

Sukamta menegaskan upaya-upaya preventif dalam mencegah kemungkinan penyebaran virus Corona dalam upaya penyelamatan WNI bisa dilakukan beberapa langkah.

"Pertama, pemeriksaan secara ketat WNI yang akan di evakuasi. Bagi WNI yang



dipastikan sehat dan belum terjangkit maka bisa di evakuasi ke Indonesia. Sedangkan bagi yang telah dinyatakan terjangkit virus Corona maka langkah terbaik adalah dilakukan perawatan di China dengan dikawal ketat oleh Pemerintah Indonesia," ujar Doktor lulusan Salford University, Mancaster, Inggris ini.

Sukamta kemudian melanjutkan rekomendasi-rekomendasinya.

"Kedua, lokasi karantina di Indonesia seharusnya tidak ditempatkan di kawasan padat penduduk. Info yang beredar WNI dari Wuhan akan dikarantina di Asrama Haji

Pondok Gede. Langkah ini harus dipertimbangkan kembali. WNI mungkin bisa ditempatkan di rumah sakit apung milik TNI. Atau mungkin bisa meniru Australia yang menempatkan warga negaranya di pulau yang terpisah jauh dari pula yang padat penduduk," usul Sukamta tanpa ada maksud mengucilkan atau membedakan-bedakan WNI.

Sukamta kemudian mengajak rakyat Indonesia untuk berdoa agar virus ini bisa segera ditemukan obatnya, wabah global ini bisa segera berakhir dan proses evakuasi WNI berjalan lancar.

Wakil Ketua Komisi 1 DPR Apresiasi Evakuasi WNI dari Tiongkok

Semua pihak bekerja keras dan kita harus berikan apresiasi, ini menunjukkan bahwa kita tidak akan meninggalkan WNI kita, Negara hadir dan berusaha semaksimal mungkin

Dr. ABDUL KHARIS A, SE. M.Si.Ak

Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI

Jakarta (02/02) — Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi keberhasilan Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Pertahanan, TNI dan Kementerian Kesehatan, serta semua stake holder yang telah berhasil mengevakuasi 245 warga negara Indonesia di Wuhan Tiongkok yang berjalan lancar pada hari Sabtu (1/2/2020) lalu.

"Alhamdulillah, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bersama beberapa stakeholder berhasil membawa pulang Warga Negara Indonesia yang berada di Tiongkok, kembali ke tanah air, semua pihak bekerja keras dan kita

harus berikan apresiasi, ini menunjukkan bahwa kita tidak akan meninggalkan WNI kita, Negara hadir dan berusaha semaksimal mungkin" jelas Kharis dalam release tertulis kepada Media hari Ahad (2/2/2020).

Kharis yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menambahkan bahwa Komisi 1 DPR RI dengan dukungan penuh mendukung semua langkah lanjutan terkait penggunaan pangkalan militer Indonesia di Kepulauan Natuna untuk karantina sementara WNI sesuai aturan Internasional sebagai upaya memulangkan WNI kita ke tanah air.

"Seperti yang dijelaskan

Panglima TNI, pangkalan militer Natuna memiliki fasilitas rumah sakit yang mumpuni dengan letak rumah sakit di pangkalan militer yang tak jauh dari hanggar. Rumah sakit itu juga mampu menampung hingga 300 orang yang Jarak pangkalan militer dengan pemukiman warga, berkisar 6 kilometer dan saya beserta sejumlah Anggota Komisi 1 DPR RI sudah pernah kesana dan itu benar adanya" terang Kharis yang beberapa waktu lalu melakukan kunjungan kerja ke Natuna bersama rombongan Komisi 1 DPR RI ini.

Anggota DPR RI asal Solo ini juga berharap kementerian terkait menjaga dan memastikan sterilisasi kawasan sehingga kepulangan WNI menjadi kabar baik untuk Indonesia dan khususnya keluarga.

"Kita harapkan semua WNI dan petugas yang menyertai berhasil melalui hari-hari observasi dan kembali bersama keluarga tanpa kurang apapun, sehat dan kuat, insya Allah" tutup Kharis

Foto : dpr.go.id



Warga Natuna menolak WNI dari Wuhan, Netty minta pemerintah sigap

Ini ujian rasa kemanusiaan, kebangsaan, dan persatuan rakyat Indonesia sebagai bangsa besar. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi korban virus Corona. Janganlah berunjukrasa sampai seperti itu. Ini tentu menyakitkan korban dan keluarganya

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (2/2) - Upaya pemerintah mengkarantina WNI yang dievakuasi dari Wuhan, untuk kepentingan observasi di Lanud Raden Sajjad, Natuna, ditentang warga. Menurut Kabid Humas Polda Kepulauan Riau Kombes Harry Goldenhardt sebagaimana dilansir media, warga berunjuk rasa dengan membakar ban, sementara itu Polri dan TNI terus melakukan negosiasi secara persuasif dengan warga.

Netty Prasetyani, anggota Komisi IX DPR RI, mengungkapkan rasa

prihatinnya atas kejadian. "Saya prihatin. Di satu sisi kita menuntut pemerintah bertindak sigap, tepat sasaran, dan prosedural untuk melindungi WNI yang ada di Wuhan. Namun di sisi lain, kita menyaksikan dinamika masyarakat yang bereaksi berlebihan tersebut", ungkap Netty.

Menurut Netty, secara pribadi, ia dapat mengerti dinamika penolakan warga akibat rasa takut dan khawatir. Namun, lanjut Netty, dalam situasi seperti ini, hendaknya kita justru menunjukkan sikap solidaritas bangsa. "Ini ujian

rasa kemanusiaan, kebangsaan, dan persatuan rakyat Indonesia sebagai bangsa besar. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi korban virus Corona. Janganlah berunjukrasa sampai seperti itu. Ini tentu menyakitkan korban dan keluarganya", jelas Netty

Menurut Netty, sikap warga Natuna yang menolak WNI evakuasi dari Wuhan lebih karena kurangnya informasi akurat dan terus menerus dari pemerintah terkait penyebaran virus Corona. "Ada kesan pemerintah lambat dan memandang kecil persoalan", pungkas Netty.

Padaahal, kata Netty, "Sejak awal saya sudah meminta Menkes untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan akurat. Gunakan rilis running text resmi terus menerus di semua media TV, misalnya. Sampaikan agar rakyat tetap tenang, pemerintah telah mengambil langkah ini dan itu, termasuk evakuasi WNI dari Wuhan dan rencana penempatan sementara di



Natuna, untuk kepentingan observasi. Rakyat perlu tahu dengan jelas bahwa pemerintah telah sigap melakukan upaya pencegahan," ujar Netty.

Akibatnya, rakyat mendapatkan informasi secara bebas dari media sosial atau media lain yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya. "Saya berharap Polri, TNI, Pemda, dan Kemenkes segera dapat menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Senin saya akan angkat masalah ini di Komisi IX," demikian tutup Netty. Foto :dpr.go.id

Cegah Penyebaran Virus Corona, Lembaga Eijkman Harus Bergerak Cepat

Kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Perlu ada upaya bersama agar penyebaran virus ini tidak terus meluas. Pemerintah harus cepat mengambil keputusan dan jangan meremehkan masalah besar ini

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (27/01) — Menghadapi kejadian luar biasa akibat penyebaran virus corona yang telah menelan banyak korban, seharusnya Pemerintah bersikap cepat dan tegas mengambil kebijakan yang diperlukan. Libatkan semua elemen terkait untuk melakukan upaya preventif agar dampak infeksi virus mematikan tersebut tidak meluas.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR-RI, Mulyanto berharap Pemerintah bisa mengoptimalkan peran Lembaga Biologi Molekuler Eijkman (LBM Eijkman) untuk meneliti kasus

ini secara cepat dan mendalam untuk mencegah meluasnya penyebaran wabah corona tersebut.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu melakukan penelitian biologi molekuler dan bioteknologi kedokteran, seharusnya LBM Eijkman dapat berperan lebih banyak dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona.

"Kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Perlu ada upaya bersama agar penyebaran virus ini tidak terus meluas. Pemerintah harus

cepat mengambil keputusan dan jangan meremehkan masalah besar ini," ujar Mulyanto.

Mulyanto minta LBM Eijkman lebih aktif meneliti penyebaran virus corona ini. Diharapkan dari penelitian itu dapat dihasilkan terobosan yang bisa mencegah meluasnya penyebaran virus corona.

"Saat ini masyarakat panik. Perlu ada tindakan nyata dari Pemerintah untuk menenangkan," ujar anggota Komisi VII DPR RI, yang membidangi masalah energi, lingkungan hidup dan IPTEK.





Alifudin Imbau Pemprov Kalimantan Barat Waspada Virus Corona

Menurut saya ini sudah berbahaya kita harus siaga dan pemerintah harus waspada terutama mengontrol warga Cina datang ke Indonesia melalui jalur bandara dll, petugas pemerintah harus mengecek juga warga Indonesia yang wisata atau tinggal dicina, agar semuanya bisa dicari solusinya

H. ALIFUDDIN, S.E.,M.M

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (28/01) — Wabah virus Corona yang berawal dari Kota Wuhan, China masih mengkhawatirkan dikarenakan jumlah korban dan sebaran terus bertambah, hal ini menjadi perhatian Anggota DPR RI Komisi IX, Alifudin Dapil Kalbar I.

Alifudin, yang dihubungi melalui pesan singkat, Senin (27/01) di gedung DPR, Jakarta, mengatakan pemerintah baik pusat maupun daerah harus meningkatkan kewaspadaan terkait virus Corona.

Alifudin, Anggota Komisi IX DPR RI yang membawahi bidang kesehatan meminta Menteri Kesehatan agar bisa

segera koordinasi dengan daerah terkait penanganannya.

"Menurut saya ini sudah berbahaya kita harus siaga dan pemerintah harus waspada terutama mengontrol warga Cina datang ke Indonesia melalui jalur bandara dll, petugas pemerintah harus mengecek juga warga Indonesia yang wisata atau tinggal dicina, agar semuanya bisa dicari solusinya" ujarnya.

Alifudin juga mengimbau ke Pemprov Kalbar agar mengantisipasi kedatangan turis mancanegara, khususnya yang dari China, karena sebentar lagi akan ada event besar di Kalbar, khususnya

Singkawang dan Kota Pontianak.

"Sampai hari ini pemerintah pusat belum menetapkan larangan terkait kedatangan turis dari China, dan kita ketahui bersama, sebentar lagi akan ada event perayaan Cap Go Meh, nah Pemprov dan Pemkot harus benar-benar bisa mengantisipasi, agar wisman yang nantinya datang ke Kalbar bisa di jamin bebas dari virus Corona, masalahnya mampu ndak?" tambahnya.

Selain di Bandara, Alifudin juga mengingatkan jalur masuk wisman melalui jalur darat, perbatasan Entikong dan perbatasan lainnya yang bisa dilewati siapapun.

"Kita berharap jangan sampai masuk ke Indonesia apalagi Kalbar, makanya kita memberikan masukan untuk pemerintah selalu siaga dan waspada dijalur bandara dan lain lain agar virus corona tidak masuk ke Indonesia, malah kalo mau kita bisa ikuti negara negara lain yang membuat aturan turis dari China dilarang masuk untuk sementara," tutupnya.

Foro : dor.go.id



Mufida berharap PMI mendapat perlindungan dini dari virus Corona

“Pemerintah harus melakukan tindakan dini terkait virus Corona, sebagai bentuk perlindungan Pekerja Migran sebagaimana amanah Undang-Undang

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (23/01) — Merebaknya penularan Virus Corona di beberapa negara harus segera diantisipasi pemerintah, terutama perlindungan bagi para pahlawan devisa, Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Pemerintah harus melakukan tindakan dini terkait virus Corona, sebagai bentuk perlindungan Pekerja Migran sebagaimana amanah Undang-Undang,” demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Kurniasih Mufidayat dalam siaran persnya, Kamis (23/01/2020).

Virus Corona atau yang dikenal dengan 2019-nCoV Virus, diketahui pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok. Virus ini kemudian menyebar ke beberapa negara. Hingga kini, setidaknya telah merengut nyawa 17 orang.

Hal ini sangat mengkhawatirkan, karena para ahli telah mengkonfirmasi bahwa virus ini dapat menular antar manusia. Karena itu, semua negara juga telah meningkatkan aktivitas pengawasannya.

Termasuk juga di Hongkong, sebagai salah satu negara yang sangat dekat dengan Cina, dan memiliki aktivitas warga yang sangat banyak, dikhawatirkan akan ikut merasakan dampaknya.

“Jumlah WNI, termasuk pekerja migran Indonesia di Hongkong cukup banyak. Karenanya, Saya menghimbau Konjen RI di Hongkong untuk segera membuka posko dan hotline centre sebagai pusat informasi dan aduan bagi PMI di Hongkong. Jika memungkinkan pro aktif memberikan peringatan kepada semua WNI

disana, khususnya Pekerja Migran Indonesia,” tegas Mufida.

Ditambahkan, pemerintah harus aktif memantau dan memberikan edukasi kepada para PMI. Hal ini sangat penting sebagai perlindungan awal demi mencegah agar jangan tertular virus tersebut.

Mufida juga mengimbau para PMI agar terus berusaha menjaga kebersihan dan higienitas dirinya dan tempat kerja. Sedapat mungkin menghindari kontak yang tidak perlu agar jangan sampai tertular.

“Segeralah menghubungi tenaga medis jika dirasa ada gejala-gejala yang mirip dengan virus ini, sebab sangat berbahaya bagi kesehatan manusia,” pesan Mufida.

Diketahui, di Hongkong terdapat lebih dari 150 ribu WNI mencari nafkah sebagai PMI. Setiap tahunnya selalu ada penambahan jumlah PMI baru memasuki Hongkong dan negara-negara lain.





HNW Desak Jokowi Segera Perintahkan Evakuasi WNI di Wuhan

“Apabila Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi tidak mengusahakan hal tersebut secara maksimal, maka pemerintah bisa dinilai abaikan perintah konstitusi dan tak laksanakan maksimal ketentuan yang diberikan oleh UU

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI II meliputi Luar Negeri

Jakarta (30/01) --- Anggota DPR RI, dari Daerah Pemilihan Luar Negeri (Jakarta II) Hidayat Nur Wahid mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera memerintahkan dan memimpin langsung negosiasi dan proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) di Wuhan, Tiongkok, terkait semakin mewabahnya virus corona.

Hal ini perlu dilakukan karena tidak sebagaimana dikesankan, seolah-olah Wuhan tertutup dan tak bisa dilakukan evakuasi, krn ternyata sejumlah negara seperti Jepang, Amerika Serikat dan Jerman sudah memperoleh izin dari Tiongkok untuk mengevakuasi warganya dari Wuhan.

Ada 240 warga Amerika Serikat sudah dievakuasi, 206

warga Jepang juga sudah tiba di Tokyo dari Wuhan, serta besok Jerman juga akan mengevakuasi warganya.

Diplomasi tingkat tinggi perlu dilakukan untuk memperoleh izin evakuasi tersebut. Bahkan, di Maroko, rajanya memimpin secara langsung rapat proses evakuasi.

“Kalau Raja Maroko yang di ujung barat Afrika Utara saja memimpin langsung rapat untuk pemulangan warganya dari Wuhan, saya membayangkan Presiden Jokowi juga memimpin rapat serupa untuk lakukan lobby tingkat tinggi, agar Pemerintah Indonesia diizinkan oleh Tiongkok untuk evakuasi WNI,” ujar pria yang akrab disapa HNW ini, Selasa (29/1).

HNW mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengirim logistik dan masker, juga Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia yang telah menyiapkan pesawat2 terbang untuk evakuasi. Namun, langkah tersebut belum cukup, apabila proses evakuasi belum dilakukan, karena yang diminta oleh WNI di sana adalah untuk dievakuasi.

Lebih lanjut, HNW menegaskan proses evakuasi wajib dilakukan oleh pemerintah Indonesia sbg bentuk perlindungan thd WNI.

“Pembukaan UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dimana pun mereka berada,” tukasnya.

Perintah konstitusi tersebut juga diturunkan ke Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Terutama, Pasal 21 yang berbunyi, “Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah



yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.”

HNW mengatakan, sebagaimana disampaikan Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Wuhan Nur Musyafak, banyaknya permintaan WNI di Wuhan untuk dievakuasi merupakan bukti bahwa ada rasa keterancaman atas bahaya yang nyata sebagaimana disebutkan dalam UU itu.

“Apabila Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi tidak mengusahakan hal tersebut secara maksimal, maka pemerintah bisa dinilai abaikan perintah konstitusi dan tak laksanakan maksimal ketentuan yang diberikan oleh UU,” ujarnya.

Lebih lanjut, HNW mengutarakan setiap pihak wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Selengkapnya di fraksi.pks.id

ABDUL KHARIS Pemerintah harus siapkan kondisi terburuk seperti evakuasi dan karantina sesuai dengan SOP penanganan internasional dalam menghadapi virus ini

SUKAMTA lokasi karantina bagi WNI juga harus dipastikan meminimalisir kemungkinan penyebaran virus Corona ini. Hal ini penting agar tidak ada penyebaran virus Corona di Indonesia

TORIQ HIDAYAT Pemerintah perlu secara intensif menjalin komunikasi dengan tiap-tiap individu mengenai kebutuhan mereka sehari-hari,

MULYANTO Kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Perlu ada upaya bersama agar penyebaran virus ini tidak terus meluas.

ALIFUDDIN Kita harus siaga dan pemerintah harus waspada terutama mengontrol warga Cina datang ke Indonesia melalui jalur bandara dll

KURNIASIH MUFIDAYATI Pemerintah harus melakukan tindakan dini terkait virus Corona, sebagai bentuk perlindungan Pekerja Migran sebagaimana amanah Undang-Undang

NETTY PRASETYANI Perketat pengawasan jalur pintu masuk Indonesia dari luar negeri, terutama negara terdampak virus, baik di Bandara, Pelabuhan, bahkan Pos Lintas Batas Negara. Kemenkes bisa kerjasama dengan TNI / Polri dalam hal ini

ANSORY Sejauh ini belum ada kasus penyebaran virus Corona di Indonesia. Namun, potensi bahaya terus ada sebab Indonesia memiliki perjanjian visa bebas dengan Tiongkok sehingga berpergian di kedua negara cukup mudah

HIDAYAT NURWAHID Kita harus saling bahu membahu melindungi WNI, terlepas apa pun partai dan afiliasi politiknya



EVAKUASI SEGERA

WNI DI WUHAN



Fraksi PKS DPR dan Fraksi Nasdem Bertemu Kembali, Bahas Sejumlah Isu Parlemen

Pertemuan ini adalah tindak lanjut untuk kedua kalinya silaturahmi DPP PKS dengan DPP Nasdem dilanjutkan ditingkat DPR antara fraksi PKS dengan fraksi Nasdem yang lebih teknis karena ada beberapa persoalan yang ada di parlemen terkait kerakyatan, kebangsaan dan keamatan

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (30/1) - Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dan Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-Nasdem) bertemu membahas sejumlah persoalan terkini di Parlemen, diantaranya terkait Omnibus Law dan Pansus Jiwasraya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Bendahara Fraksi Habib Aboe Bakar Al Habsyi dan Wakil Ketua Fraksi Bidang Ekuin Ecky Awal Muhamaram. Diterima oleh Wakil Ketua DPR RI asal Fraksi Nasdem Rahmat Gobel bersama sejumlah Anggota DPR RI.

"Pertemuan ini adalah tindak lanjut untuk kedua kalinya silaturahmi DPP PKS dengan DPP Nasdem dilanjutkan ditingkat DPR antara fraksi PKS dengan fraksi Nasdem yang lebih teknis karena ada beberapa persoalan yang ada di parlemen terkait kerakyatan, kebangsaan dan keamatan." disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dihadapan awak media pasca pertemuan hari Kamis (30/1) di Gedung DPR.

Jazuli menambahkan, Fraksi PKS menghargai posisi Nasdem sebagai partai koalisi

yang menginginkan supaya aturan main sejumlah isu di parlemen lebih simpel, sangat memahami dan mendukung itu. Namun demikian yang penting buat PKS jangan sampai mengorbankan kepentingan rakyat.

Jazuli memberikan paparan, seperti pembahasan Omnibus Law cipta lapangan kerja dimana sejumlah atau mungkin puluhan undang-undang yang akan dilebur jadi satu agar jangan terjadi tumpang tindih pasalnya dan seterusnya, secara prinsip sangat bagus sekali. Tetapi kalau nanti kaitannya dengan buruh dan seterusnya, tentu PKS ingin juga tetap dijaga temen-temen buruh hak-haknya. Selaras dengan itu, PKS juga tidak ingin nanti pemerintah atau DPR ini hanya memanjangkan buruh tapi mengabaikan pemilih modal karena dua-duanya harus bersama-sama bersinergi.

"Semua harus merasa sama-sama _enjoy_ dan berpikir ke depan, karenanya kita berbicara perlu menjadi



satu dan membangun komunikasi yang baik untuk kepentingan bangsa" ujar Jazuli.

Anggota Legislatif asal Banten ini meminta pengertian Nasdem jika nanti PKS mengusulkan dibentuknya Pansus anket Jiwasraya, sebagaimana partai berlambang bulan sabit ini menghormati sikapnya Nasdem.

"PKS mengusulkan Pansus anket, kami ya kira-kira minta izin dan dimengerti, seperti mengertinya PKS apapun

sikapnya Nasdem yang akan diambil sebagai partai koalisi tetapi Kami yakin bahwa dalam hal-hal yang kita bertemu seluruhnya untuk rakyat" pungkas Jazuli.

Dalam kesempatan tersebut Fraksi Nasdem yang diwakili oleh Rahmat Gobel menyampaikan pertemuan hari ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan kemarin antara pimpinan kedua partai di kantor DPP Nasdem sebagai bentuk komunikasi politik.



Fraksi PKS dengan Fraksi Nasdem DPR RI kembali Bertemu

Jakarta (30/1) - Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dan Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-Nasdem) bertemu membahas sejumlah persoalan terkini di Parlemen, diantaranya terkait Omnibus Law dan Pansus Jiwayasa.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Bendahara Fraksi Habib Aboe Bakar Al Habsyi dan Wakil Ketua Fraksi Bidang Ekuin Ecky Awal Muharam. Diterima oleh Wakil Ketua DPR RI asal Fraksi Nasdem Rahmat Gobel bersama sejumlah Anggota DPR RI.

Fraksi PKS Tegur Keras Rafly

Soal Kemungkinan Ekspor Ganja Untuk Farmasi, Rafly Minta Maaf dan Menarik Usulan Pribadinya

Jakarta (31/1) – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menegur Anggota Komisi VI asal Aceh Rafly yang membuat pernyataan saat Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan soal kemungkinan regulasi tanaman ganja agar bisa diekspor untuk kebutuhan farmasi atau obat.

Jazuli menyampaikan pernyataan publik melalui Siaran Pers sebagai berikut.

Pertama, Rafly sebagai pribadi anggota DPR namun tidak mewakili sikap PKS, berbicara dalam forum Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan tentang peningkatan ekspor komoditas nasional dan lokal untuk menggenjot ekonomi dan pemasukan negara.

“Beliau melihat tanaman ganja sering disalahgunakan sebagai narkotika dan Aceh sebagai daerah pemilihannya sering dikaitkan dengan tanaman ini. Jadi menurutnya, negara perlu tegas membuat regulasi mengatasi penyalahgunaan ini. Jikapun ada manfaat, Rafly meminta negara mengkajinya dalam batasan ketat dan terbatas apakah untuk ekspor demi pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi termasuk untuk obat atau farmasi”, ungkapnya.

Kedua, kata Jazuli, Fraksi PKS menilai pernyataan pribadi Rafly kontroversial, dan menimbulkan polemik yang kontraproduktif, apalagi usulan itu tidak mencerminkan sikap Fraksi PKS, Partai yang selama ini justru dikenal vokal menolak narkoba dan mendukung Badan Narkotika Nasional (BNN).

Betapapun menurut Rafly ada peluang tanaman ganja bisa diatur dalam regulasi yang khusus, dalam batasan tertentu ganja bisa menjadi bahan baku industri obat atau farmasi dan beberapa negara meregulasi hal serupa, akan tetapi FPKS memahami bahwa UU kita khususnya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tegas melarang ganja dan mengkategorikannya sebagai narkotika golongan 1”, jelas Jazuli.

Narkotika golongan ini, lanjutnya, dilarang untuk pelayanan kesehatan, meski

dalam UU 35/2009 juga terdapat pengecualian dalam jumlah terbatas bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Atas dasar itulah Fraksi PKS menegur Rafly. Dan yang bersangkutan meminta maaf atas kesilapan pikiran dan pernyataan pribadi itu sehingga menimbulkan polemik serta membuat salah paham di kalangan masyarakat. Dan Rafly menarik usulan pribadinya”, pengkasnya.

Lebih lanjut, Fraksi PKS meminta agar beliau berhati-hati dalam membuat pernyataan yang lebih banyak madharatnya, apalagi menyangkut isu sensitif yang bisa kontraproduktif dengan semangat pemberantasan narkoba, yang selama ini menjadi perhatian penting PKS.

“Ketiga, Fraksi PKS tegas menyatakan tidak ada toleransi bagi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia”, tambahnya.

Hal tersebut lanjut Jazuli, dibuktikan dengan komitmen Fraksi PKS sebagai satu-satunya Fraksi di DPR yang sudah secara reguler (setahun



Dengan teguran keras Fraksi PKS dan permintaan maaf Pak Rafly, serta penarikan usulan pribadinya itu, diharapkan kesalahpahaman dan polemik yang berkembang di masyarakat bisa diluruskan dan tidak dilanjutkan

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

dua kali) mengadakan tes urine untuk Anggota dan Staff nya bekerjasama dengan BNN. BNN pun menyampok sangat positif thd sikap FPKS tersebut.

“Sama dengan Fraksi PKS, Rafly bahkan mengusulkan hukuman mati bagi bandar dan pedegar narkoba. Dan itu ia suarakan sejak lama, sejak menjadi Anggota DPD RI 2014-2019 hingga kini bergabung ke PKS dan terpilih menjadi Anggota DPR dari Aceh,” tandasnya.

Keempat, kata Jazuli, dengan teguran Fraksi PKS dan permintaan maaf Rafly, serta penarikan usulan pribadinya, diharapkan kesalahpahaman dan polemik yang berkembang di masyarakat bisa diluruskan dan tidak dilanjutkan. “Mari bersama PKS dan BNN kuatkan tekad dan kebersamaan melawan narkoba dalam segala bentuknya, termasuk ganja, yang telah menjadikan Indonesia sebagai darurat narkoba”, tutup Jazuli.

DPR Desak kirim delegasi Parlemen Negara-negara OKI ke Yerusalem dan Xinjiang

Delegasi Indonesia mengusulkan agar PUIC mengirimkan Delegasi untuk secara langsung meninjau kondisi Komunitas Muslim Uyghur di Xinjiang guna mendapatkan informasi dan mengumpulkan fakta-fakta dari lapangan

Dr. H. MARDANI, M.Eng

Delegasi DPR RI

Delegasi DPR RI mendesak Parliamentary Union of The OIC Member States (PUIC/Persatuan Parlemen Negara-negara OKI) pertimbangan pengiriman Delegasi PUIC ke Al Aqsa di Yerusalem dan Xinjiang untuk melihat langsung situasi faktual. Demikian disampaikan Mardani Ali Sera di sidang Komisi Budaya, Hukum, Peradaban dan Agama PUIC yang dihelat dari 27-30 Januari 2020 di Ouagadougou, ibu kota Burkina Faso.

Usulan politisi PKS itu menyeruak ketika forum berdebat mengenai perlu atau

tidaknya sebuah resolusi khusus untuk menyikapi situasi di Uyghur. "Delegasi Indonesia mengusulkan agar PUIC mengirimkan Delegasi untuk secara langsung meninjau kondisi Komunitas Muslim Uyghur di Xinjiang guna mendapatkan informasi dan mengumpulkan fakta-fakta dari lapangan. Dengan demikian PUIC bisa mendapatkan gambaran sesungguhnya, sehingga langkah PUIC ke depan dalam menyikapi situasi di Xinjiang bisa lebih tepat," tegas legislator dari daerah pemilihan Jakarta I itu, Ouagadougou, (30/01/2020).

Selain kunjungan ke Xinjiang, sambung Mardani, PUIC juga diminta mengirimkan Delegasi untuk meninjau situasi di Al Aqsa secara langsung. "Sebagai ibu kota abadi negara Palestina, kita juga harus tunjukkan dukungan kita terhadap Yerusalem termasuk Masjid Al Aqsa. Kunjungan Delegasi PUIC ke Yerusalem dan Al Aqsa akan memberikan dukungan kuat parlemen negara-negara Muslim terhadap masalah Palestina," tegas anggota Komisi II DPR itu.

Saran yang disampaikan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR tersebut disetujui oleh seluruh peserta sidang. Usulan tersebut dinilai sangat diperlukan daripada memperdebatkan perlu atau tidaknya draf resolusi terkait Uyghur.

Untuk diketahui, Organisasi Parlemen Negara-negara Anggota OKI mengelhat sidang tahunan yang ke-15 di Burkina Faso, 27-30 Januari 2020. Delegasi DPR ikut berpartisipasi di sidang tersebut yang dipimpin Wakil Ketua DPR



Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Azis Syamsudin.

Pada sidang tahunan tersebut dibahas berbagai permasalahan yang tengah dihadapi oleh Negara-negara

Islam. Selain Mardani, anggota DPR Muslim dari Fraksi Demokrat tercatat sebagai anggota Komisi Budaya, Hukum, Peradaban dan Agama



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Desak kirim delegasi Parlemen Negara-negara OKI ke Yerusalem dan Xinjiang

*Delegasi Indonesia mengusulkan agar PUIC
mengirimkan Delegasi untuk secara langsung
meninjau kondisi Komunitas Muslim Uyghur di Xinjiang
guna mendapat-kan informasi dan mengumpulkan
fakta-fakta dari lapangan*

Dr. H. Mardani, M.Eng
Delegasi DPR RI

Wakil Ketua Komisi 1 DPR Minta Indonesia Tolak Peta Jalan Trump

“Indonesia harus mengoptimalkan posisinya saat ini di DK PBB, banyak resolusi PBB yang dilanggar dalam peta usulan Amerika seperti Status Jerusalem yang dijadikan ibukota sepihak oleh Israel, pemukiman illegal di Tepi Barat yang mencaplok tanah Palestina dan banyak kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel sangat jelas sekali ini menjadi peta yang merusak perdamaian di Palestina dan Indonesia harus menolak itu”

Dr. ABDUL KHARIS A, SE. M.Si.Akt

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Jakarta (30/01) -- Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almsyahari meminta Kementerian Luar Negeri RI untuk segera mendesak Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) mengagendakan sidang darurat menyikapi Peta Jalan damai Israel-Palestina usulan Presiden AS Donald Trump yang dimana sesuai dengan Pasal 24 Piagam

PBB tugas Dewan Keamanan adalah Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

“Apa yang terjadi di Kawasan Timur Tengah khususnya Palestina dimana Amerika dan Israel dalam membuat peta sepihak jalan damai yang berbau konspirasi dua orang yang bermasalah di negerinya masing-masing itu

perlu segera dibahas dalam agenda DK-PBB karena dapat mengancam perdamaian internasional,” jelas Kharis dalam keterangan tertulis, kepada media (29/01/2020).

Menurut legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini, apa yang dilakukan oleh Trump yang saat ini terancam pemakzulan dan Netanyahu yang terjerat kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang didakwakan kepadanya di pengadilan Israel jelas sebagai upaya konspirasi kotor yang membahayakan perdamaian dunia.

“peta buatan AS dan Israel ini jelas menjadi ketegangan baru bagi keamanan kawasan, Presiden Palestina jelas menolak usulan sepihak itu dan wajar bila Indonesia meminta anggota DK-PBB untuk membahas apa yang terjadi saat ini,” terang Kharis.

Perlu diketahui Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia sempat memegang jabatan Presiden DK PBB pada Mei tahun 2019 dan tahun 2020



bulan Agustus/September akan kembali menjabat. Setiap anggota DK PBB berdasarkan urutan alfabet diberikan kesempatan untuk menjabat dan memimpin persidangan DK PBB selama satu bulan.

“Indonesia harus mengopti-malkan posisinya saat ini di DK PBB, banyak resolusi PBB yang dilanggar dalam peta usulan Amerika seperti Status

Jerusalem yang dijadikan ibukota sepihak oleh Israel, pemukiman illegal di Tepi Barat yang mencaplok tanah Palestina dan banyak kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel sangat jelas sekali ini menjadi peta yang merusak perdamaian di Palestina dan Indonesia harus menolak itu” tutup kharis.

Foto : dpr.go.id

Bertemu Kemkominfo, Toriq Minta Akses Informasi Maksimal di Indonesia Timur

Penyediaan satelit merupakan satu-satunya teknologi akses yang cepat dan efisien untuk menangani lokasi-lokasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) dan Non 3T, yakni daerah-daerah pulau-pulau perbatasan serta daerah yang memiliki medan berat menantang. Sehingga kebutuhan konektivitas untuk layanan publik seperti sarana pendidikan, Pemda/Pemko dan fasilitas kesehatan terpenuhi dan tercukupi

KH TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (27/01) — Dalam Kegiatan Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi I DPR RI ke Kupang, Kamis, (23/01/2020) Toriq Hidayat anggota Fraksi PKS mengatakan hampir semua daerah-daerah di Indonesia memiliki masalah utama yakni belum terjangkau akses telekomunikasi.

Menurut Toriq, saat ini

lebih dari 149.400 titik layanan publik yang terdiri dari sarana pendidikan, Pemda/Pemko dan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia mengalami kekurangan konektivitas, bahkan ada yang mengalami blank spot (tidak ada sinyal), hal ini tidak tercover oleh BTS/Tower yang diakibatkan oleh hambatan gunung,

ketebalan hutan dan letak geografis.

"Penyediaan satelit merupakan satu-satunya teknologi akses yang cepat dan efisien untuk menangani lokasi-lokasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) dan Non 3T, yakni daerah-daerah pulau-pulau perbatasan serta daerah yang memiliki medan berat menantang. Sehingga kebutuhan konektivitas untuk layanan publik seperti sarana pendidikan, Pemda/Pemko dan fasilitas kesehatan terpenuhi dan tercukupi", ungkap Toriq.

Kunjungan Anggota Komisi I DPR RI ke Kupang adalah dalam rangka melihat Penyediaan infrastruktur telekomunikasi oleh Bakti dan Kemkominfo (BTS, akses internet dan Palapa Ring). Kunjungan ini disambut oleh Anang Latif sebagai Dirut BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi).

Komisi I DPR RI mendorong Bakti Kemkominfo untuk mengoptimalkan utilisasi Palapa Ring Timur dan merealisasikan program



penyediaan BTS dan akses internet sesuai target yang telah ditetapkan sehingga masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menikmati layanan telekomunikasi dengan baik.

"Selain itu Komisi I DPR RI mendorong Bakti Kemkominfo untuk terus meningkatkan sinergitas dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan

berbagai pihak untuk optimalisasi utilisasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur," ujar Toriq.

Sementara itu, kata Toriq, perkembangan Tekhnologi komunikasi saat ini membuat komunikasi lebih mudah dan cepat ; dan mudah mengakses informasi terkini tanpa batas.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Terkait Jiwasraya, Dimyati Yakini Masih ada Tersangka Lain yang Terlibat

Kita berharap terkuak dari hulu ke hilir, siapa yang punya ide gagasan, brokernya siapa, yang diuntungkan siapa, siapa oknum yang melindungi atau membiarkan, buka selebar-lebarnya,

Dr. H. R. A. Dimyati Natakusumah, S.H.,M.H.
Anggota Komisi III DPR RI

Terkait Jiwasraya, Dimiyati Yakini Masih ada Tersangka Lain yang Terlibat

Kita berharap terkuak dari hulu ke hilir, siapa yang punya ide gagasan, brokernya siapa, yang diuntungkan siapa, siapa oknum yang melindungi atau membiarkan, buka selebar-lebarnya,

Dr. H. R. A. DIMYATI NATAKUSUMAH, MH.

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (30/01) — Anggota Komisi III DPR, Achmad Dimiyati Natakusumah meyakini bahwa akan ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya. Sejauh ini, Korps Adhyaksa sudah menetapkan lima orang tersangka.

"Menurut saya (akan) lebih banyak, enggak mungkin hanya lima, pasti ada lagi, elite yang diuntungkan pasti ada," katanya saat berbincang dengan Okezone di Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melihat kasus Jiwasraya mesti ditangani

secara holistik. Pasalnya, kasus yang merugikan negara triliunan rupiah ini sangat sistematis, terstruktur dan massif (TSM).

"Kita berharap terkuak dari hulu ke hilir, siapa yang punya ide gagasan, brokernya siapa, yang diuntungkan siapa, siapa oknum yang melindungi atau membiarkan, buka selebar-lebarnya," tukas Dimiyati.

Mantan Wakil Ketua MPR RI ini menjelaskan, Komisi III DPR akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengusut kasus Jiwasraya. Seluruh fraksi sudah dimintai nama-nama yang akan masuk ke Panja. Namun demikian, Fraksi PKS masih tetap mengusulkan

dibentuknya Panitia Khusus (Pansus), tidak sekadar Panja.

"Kita tetap Pansus, tapi kita tetap monitoring," jelas Dimiyati.

Kejaksanaan Agung (Kejagung) sebelumnya mengisyaratkan akan menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya. Saat ini, Korps Adhyaksa sudah menetapkan lima orang tersangka.

"Iya tadi sudah dijelaskan sedang diproses. Nanti ketika saatnya akan diberitahukan," kata Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono saat dikonfirmasi Okezone, Rabu 29 Januari 2020.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah eks Dirut PT Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan, Komisarisi PT Hanson International Benny Tjokrosaputro, Presdir PT TRAM Heru Hidayat, dan eks Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo.



Komisi III DPR Apresiasi Polda Jabar Hadapi Pilkada Serentak 2020

Jangan sampai terjadi, hanya gara-gara pengaduan masyarakat yang belum terbukti benar, namun sudah terlebih dulu viral melalui media. Sehingga menyebabkan pihak yang sebetulnya belum tentu bersalah sudah dihukum oleh media yang dalam hal ini masyarakat yang terinfokan melalui media tersebut. Untuk itu netralitas pada saat Pilkada 2020 harus betul-betul dijaga

Drs. H. ADANG DARADJATUN

Anggota Komisi III DPR RI

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir (F-Golkar) mengapresiasi kesiapan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Sebagaimana diketahui, ada 7 daerah di Jabar akan melaksanakan Pilkada, yaitu Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, dan Pangandaran. "Berdasarakan laporan yang sudah disampaikan oleh Kapolda, baik kesiapan

pengamanan dan juga kesiapan koordinasi termasuk dengan Kejaksaan Tinggi, KPU serta Bawaslu sudah dipersiapkan dengan baik," ungkap Adies usai memimpin rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda dan Kajati Jabar, di Bandung, Jabar, Jumat (24/1/2020).

Senada dengan Adies, Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mengimbau baik Polda maupun Kejati Jabar beserta jajaran untuk turut

serta menjaga netralitas dan independensi menjelang Pilkada serentak 2020. Dirinya berharap agar penegakan hukum dapat betul-betul terarah dengan baik.

"Jangan sampai terjadi, hanya gara-gara pengaduan masyarakat yang belum terbukti benar, namun sudah terlebih dulu viral melalui media. Sehingga menyebabkan pihak yang sebetulnya belum tentu bersalah sudah dihukum oleh media yang dalam hal ini masyarakat yang terinfokan melalui media tersebut. Untuk itu netralitas pada saat Pilkada 2020 harus betul-betul dijaga," jelas politisi Fraksi PKS ini.

Sebelumnya Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Suhatriadi menuturkan, Polda Jabar sudah melakukan pemetaan, cipta kondisi, serta kegiatan preventif dan preentif dalam menghadapi Pilkada serentak 2020. "Kami sudah terapkan Operasi Mantap Praja dan selanjutnya kita juga melakukan persiapan tahapan gelar pengamanan baik di Polres maupun di Polda," jelasnya.

Selain itu dirinya menuturkan, telah menerapkan strategi jempit bola di tujuh kabupaten di Jabar yaitu



dengan cara mendatangi langsung calon peserta Pilkada untuk nantinya diajak berdiskusi untuk menciptakan Pilkada yang kondusif. "Karena yang paling penting dalam

bertanding itu, menang kalah hal yang wajar, yang perlu diingat siapapun pemenangnya sudah pasti sesuai dengan takdirnya," imbuh Rudy

Raker Bersama KPK, Komisi III DPR Pastikan Kewenangan Komisioner dan Dewas

Karena saat ini Undang-Undangnya baru, Struktur Komisioner KPK nya masih baru, dan Dewan Pengawasnya baru, maka kita perlu duduk bersama, membangun sinergitas antar komponen ini",

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (28/01) — Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (27/01/2020).

Raker kali ini sedikit berbeda dengan raker sebelumnya, dimana Dewan Pengawas KPK juga turut hadir, sebagai konsekuensi dari UU KPK yang baru yaitu UU No. 19 Tahun 2019.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Aboebakar Alhabsy mengapresiasi kehadiran Dewan Pengawas KPK dan segenap Komisioner KPK dalam Raker kali ini.

"Karena saat ini Undang-

Undangya baru, Struktur Komisioner KPK nya masih baru, dan Dewan Pengawasnya baru, maka kita perlu duduk bersama, membangun sinergitas antar komponen ini", ungkap pria yang disapa Habib Aboe ini.

Menurut Habib Aboe, pihaknya dan rekan-rekan di Komisi III, ingin meyakinkan bahwa mereka telah memahami pembagian tugas masing masing.

"Jadi sejauh mana peran Dewan Pengawas dalam kegiatan operasional, ini harus sama-sama paham", terang Bendahara Fraksi PKS ini.

Selain itu, kata Habib Aboe, kami juga ingin

memastikan bahwa Komisioner dan Dewan Pengawas KPK sudah membangun sinergi.

"Misalkan saja mengenai SOP, apakah sama SOP pengeledahan dan penyitaan atas perkara OTT dan bukan OTT ? apakah untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan atas perkara OTT harus pula diajukan kepada dewan pengawas ? Ini semua harus kita pastikan, kita tidak ingin ada kesan saling lempar kewenangan soal ini", tegas Aboe.

Misalkan, lanjut Aboe, soal HM kemarin, ada yang bilang ijin geledah sudah keluar, ada yang bilang belum keluar. Hal seperti ini kan tidak bagus jika dilihat oleh publik.

"Karenanya kita sebagai Komisi 3 ingin memastikan mereka akan bekerja dengan sinergi sehingga bisa optimal melaksanakan pemberantasan korupsi", tutupnya.



Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi (Kanan) di sela-sela Raker Komisi III DPR dengan Pimpinan dan Dewas KPK di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020). Foto: dpr.go.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Pemerintah Harus Berdayakan Petani Garam, Bukan Malah Impor

Beri petani kita bimbingan, pendampingan dan penberdayaan. Bukan dengan solusi impor. Karena misi pemerintah harus kesejahteraan rakyat yang dalam hal ini adalah para petani garam. Pemerintah harus hadir, baik melalui kebijakan importir menyerap garam petani atau ada subsidi terkait harga garam petani kita

drh. H. Slamet

Anggota Komisi IV DPR RI

Pemerintah Harus Berdayakan Petani Garam, Bukan Malah Impor

Beri petani kita bimbingan, pendampingan dan pemberdayaan. Bukan dengan solusi impor. Karena misi pemerintah harus sejahtera rakyat yang dalam hal ini adalah para petani garam. Pemerintah harus hadir, baik melalui kebijakan importir menyerap garam petani atau ada subsidi terkait harga garam petani kita

drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (27/01) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Slamet, menyoroti rencana pemerintah untuk melakukan impor garam. Menurutny, langkah tersebut tidak menjadi solusi atas kebutuhan yang terjadi saat ini.

"Catatan saya terkait pergaraman ini, pemerintah jangan langsung main impor aja. Temui petani garam, agar tau apa yang terjadi di lapangan, dimana garam petani itu numpuk, tidak terserap. Maka bila itu yang terjadi, mengapa pemerintah memaksakan impor," ucap Slamet kepada media Slamet menjelaskan,

meskipun pada akhirnya ketercukupan garam tersebut tidak terpenuhi, maka pemerintah harus terlebih dahulu membentuk regulasi tentang bagaimana caranya garam petani dapat terserap.

"Kekurangannya baru impor. Asumsi mereka melakukan impor kan karena kebutuhan belum terpenuhi, tapi anehnya fakta di lapangan mengatakan bahwa petani garam mengeluh harganya jatuh dan stok di lapangan tidak terserap, berarti ada sesuatu yang tidak menyambung," jelas Slamet.

Orientasi pemerintah, sambung Slamet, harus pada pemberdayaan petani.

Harusnya garam hasil produksi petani tersebut diserap terlebih dahulu sebelum melakukan impor. Selain itu, pemerintah pun harus hadir bila kualitas garam petani dianggap belum memenuhi standar industri.

"Beri petani kita bimbingan, pendampingan dan pemberdayaan. Bukan dengan solusi impor. Karena misi pemerintah harus sejahtera rakyat yang dalam hal ini adalah para petani garam. Pemerintah harus hadir, baik melalui kebijakan importir menyerap garam petani atau ada subsidi terkait harga garam petani kita," tegas Slamet.

Bahkan, sambung Slamet, bila hari ini perlu untuk membahas pembentukan Dewan Garam Nasional (DGM) yang berfungsi untuk mengawasi bagaimana perjalanan garam di Indonesia, dirinya siap untuk mempertimbangkan pembahasan hal tersebut.

"Kebutuhan untuk industri saat ini belum terpenuhi. Tapi yang saya soroti adalah upaya pemerintah untuk menuju pemenuhan kebutuhan tersebut tidak ada. Rasanya sulit kalau petani harus berdaya secara mandiri, terutama terkait dengan permodalan mereka,



tetap harus ada campur tangan pemerintah," imbuh Slamet.

Slamet mengingatkan pemerintah, bila hari ini pemerintah tidak hadir untuk membela dan memberdayakan para petani garam, maka ke depan yang terjadi itu tidak

hanya impor garam, melainkan petani garamnya pun yang akan diimpor.

"Karena rakyat kita sudah tidak mau bertani garam," tandas Slamet.

Foto : dpr.go.id

Persoalan Pupuk Masih Berantakan, Swasembada Pangan Tinggal Impian

Fraksi PKS telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki aspek teknis, manajemen, dan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi sehingga memenuhi prinsip tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, dan tepat lokasi.

H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (30/01) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Johan Rosihan mengatakan, penyaluran pupuk bersubsidi masih berantakan yang mengakibatkan cita-cita swasembada pangan masih jauh terealisasi.

Pasalnya, kata Johan kelemahan-kelemahan yang selama ini terjadi baik di aspek dasar hukum, perencanaan, peredaran dan pengawasan hingga saat ini belum juga dapat terurai cara penyelesaiannya.

"Pupuk subsidi memiliki peranan penting dan strategis dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, Pemerintah perlu terus mendorong

penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan meliputi aspek teknis, penyediaan dan distribusi maupun harga melalui subsidi", tukas legislator PKS ini.

Anggota Dewan asal Sumbawa ini menyoroti tiga hal mendasar persoalan pupuk yang meliputi sisi Tepat Guna, Tepat Sasaran dan Persoalan Distribusi. Dari sisi tepat gunanya telah nyata keadaan hingga saat ini berdasarkan data Selama 10 tahun, rata-rata perbandingan peningkatan jumlah subsidi pupuk tidak sebanding dengan peningkatan produksi dan produktivitas.

Pencapaian yang ia maksud adalah selama 10 tahun, hanya memperoleh

presentase produksi sebesar 30,9% dan produktivitas sebesar 13,2%. Ia menganggap penyebab utamanya adalah belum tepat sarannya untuk petani penerima pupuk subsidi.

Johan menyampaikan, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2016, sekitar 30 persen pupuk bersubsidi jatuh ke tangan perusahaan besar.

"Secara lebih spesifik, masih sering terjadi berbagai kasus kelangkaan pasokan pupuk yang menyebabkan harga aktual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan margin pemasaran lebih tinggi dari yang telah ditetapkan pemerintah," ujar Johan.

Menurut Johan Rosihan, Fraksi PKS telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki aspek teknis, manajemen, dan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi sehingga memenuhi prinsip tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, dan tepat lokasi.

Lebih Lanjut Politisi PKS ini menjelaskan bahwa, selain permasalahan terkait kebijakan pupuk subsidi diantaranya sistem penetapan alokasi pupuk dan data akurasi petani,



implementasi tidak sesuai dengan ketentuan (moral hazard), penggunaan pupuk yang tidak sesuai dengan dosis anjuran, HET yang berlaku kurang realistis, keterbatasan anggaran belanja pemerintah, sistem distribusi tertutup yang belum optimal dan masih lemahnya pengawasan di lapangan

"Ini bukti kalau penyaluran pupuk bersubsidi di Indonesia ambruk dan memiliki banyak

kelemahan," kata dia.

"Saya Usul, PT Pupuk Indonesia bisa bersinergi dengan BUMDES dalam distribusi pupuk agar tidak ada lagi kasus kasus penyimpangan anggaran belanja pemerintah di masyarakat. Dan Alhamdulillah usul ini menjadi keputusan Rapat Kerja DPR dengan Pemerintah ketika pembahasan persoalan pupuk ini", pungkasan Johan Rosihan.

Foto : dpr.go.id



Sertifikasi Halal Lindungi Bangsa dari Serbuan Makanan Impor

Sertifikat halal diyakini bisa mencegah merajalelanya produk-produk pangan impor. Hal ini berarti secara tidak langsung sertifikat halal merupakan salah satu instrumen yang melindungi industri pangan dalam negeri

Dr. HERMANTO, S.E., M.M.

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (30/01) — Anggota Komisi 4 DPR Hermanto menegaskan label jaminan halal merupakan instrumen seleksi untuk melindungi bangsa dari serbuan produk pangan olahan impor yang mengganggu kesehatan dan nilai budaya.

Karena itu, Hermanto menegaskan harus ditolak jika ada upaya menghapus kewajiban sertifikasi halal pada produk pangan.

"Sertifikat halal diyakini bisa mencegah merajalelanya produk-produk pangan impor. Hal ini berarti secara tidak langsung sertifikat halal

merupakan salah satu instrumen yang melindungi industri pangan dalam negeri", papar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Lebih jauh Hermanto menyebutkan, didalam label halal terkandung spirit halalalan toyiban (halal dan baik).

"Halal itu aspek nilai. Saat pangan dikonsumsi, selain mencukupi kebutuhan tubuh juga menghadirkan ketenangan batin", jelas legislator dari FPKS ini.

Sedangkan toyiban atau baik, lanjutnya, merupakan aspek kesehatan. "Pangan

yang dikonsumsi harus menyehatkan tubuh. Bukan sebaliknya, merusak atau menimbulkan penyakit bagi tubuh," ucapnya.

Itulah nilai budaya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengkonsumsi pangan yang mencukupi kebutuhan tubuh, menyehatkan raga dan menghadirkan ketenangan jiwa.

"Jadi makan itu merupakan upaya mencukupi kebutuhan jiwa dan raga. Bukan sekedar raga saja," pungkas legislator dari dapil Sumatera Barat 1 ini.





الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا

سَاءَ مَا كَسَبْنَا وَإِنَّا لِلَّهِ أَجْمَعُونَ

Atas nama keluarga besar Fraksi PKS DPR RI
Turut berduka atas berpulangnya ke rahmatullah
Pengasuh Ponpes Tebuireng,

Dr. Ir. KH. **SALAHUDDIN WAHID**

Pada Ahad 2 Februari 2020, pk. 20.55 WIB
di RS Harapan Kita Jakarta

Semoga Allah SWT menerima
amal ibadahnya serta menempatkannya
di tempat terbaik Jannah-Nya
Amin



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI



DPR Minta Pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi Diselesaikan Segera

“Dulu pemerintah pernah janji akhir tahun 2019 (tahun lalu) kedua bendungan tersebut sudah selesai, nyatanya kan meleset sehingga ketika musim hujan deras tahun ini belum ada reduksi aliran dari hulu. Proyek ini jangan molor lagi selesainya karena sangat signifikan mengurangi limpahan air di hulu,

Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (29/01) — Awal tahun ini terjadi banjir cukup besar di Jakarta. Hujan lebat mengguyur Jakarta dan sekitarnya beberapa jam selama pergantian Tahun Baru, yakni tanggal 1 dan 2 Januari 2020.

Akibatnya sejumlah daerah di Jabodetabek banjir. Hujan deras kembali turun pada Kamis dinihari dan melumpuhkan akan sejumlah ruas jalan.

Setelahnya terjadi silang pendapat terkait siapa yang bertanggung jawab atas banjir tersebut. Pemerintah pusat beranggapan bahwa ada tugas dari pemerintah provinsi yang belum dikerjakan.

Sebaliknya pemerintah

provinsi membela diri dan beranggapan terjadinya banjir karena masalah di hulu yang menjadi tugas pemerintah pusat.

Sigit Sosiantomo, anggota Komisi V DPR RI mengingatkan agar ke depan tidak lagi terjadi saling lempar tanggung jawab. Penyebab banjir di Jakarta tidak hanya tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta tapi ada yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

“Di media kan dulu rame itu silang pendapat Pak Menteri PUPR dengan Pak Gubernur DKI. Ke depan tak boleh terjadi lagi seperti itu. Masing-masing harus fokus menyelesaikan apa

yang menjadi tanggung jawabnya dalam pengendalian banjir”, kata Sigit dalam rilisnya (Senin, 27/01).

Legislator Dapil Jawa Timur I itu justru menasih janji Pemerintah Pusat terkait penyelesaian pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi. Pembangunan dua bendungan di wilayah Kabupaten Bogor tersebut mundur dari jadwal penyelesaian pada akhir 2019.

Pembebasan lahan yang lambat menjadi penyebab target penyelesaian molor. Bendungan Ciawi dan Sukamahi merupakan bendungan kering yang dibangun di kawasan hulu untuk mengendalikan banjir di hilir (Jakarta). Artinya, bendungan tidak akan digenangi dengan membendung aliran sungai, tetapi berfungsi menampung air saat curah hujan tinggi.

Kedua bendungan tersebut didesain untuk mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta dengan menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum sampai ke Bendung katulampa yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung.



Bendungan Ciawi dan Sukamahi diproyeksi bisa menahan debit air 30 persen sehingga bisa mereduksi aliran air hingga 11,90 persen di Pintu Air Manggarai. Kapasitas tampung kedua bendungan itu bila digabung mencapai 8,13 juta meter kubik.

“Dulu pemerintah pernah

janji akhir tahun 2019 (tahun lalu) kedua bendungan tersebut sudah selesai, nyatanya kan meleset sehingga ketika musim hujan deras tahun ini belum ada reduksi aliran dari hulu. Proyek ini jangan molor lagi selesainya karena sangat signifikan mengurangi limpahan air di hulu,” pungkasnya.

Komisi V Terima keluhan Minimnya Air bersih di sekitar bendungan Ciawi

Seharusnya masih banyak hal lain yang bisa dimanfaatkan dari sebuah bendungan. Salah satunya adalah menggerakkan air menjadi energi turbin, yang pada akhirnya bisa digunakan untuk pembangkit listrik

H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Komisi V DPR RI

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mendapat keluhan terkait minimnya air bersih dari masyarakat sekitar pembangunan proyek Bendungan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhmu mengaku menyayangkan terjadinya kesulitan warga sekitar Bendungan Ciawi untuk mendapatkan air bersih.

“Kalau terkait persoalan pembebasan lahan dalam sebuah proyek pembangunan itu hal yang biasa menurut saya, dan alhamdulillah sekarang sudah terselesaikan sedikit demi sedikit. Namun saya

sempat menjumpai warga sekitar yang mengaku kesulitan air bersih sejak adanya pembangunan bendungan tersebut. Tentu ini sangat disayangkan,” ujar Syaikhmu saat meninjau proyek pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/1/2020).

Sejatinya, lanjut politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, air yang mengalir dari beberapa sungai ke bendungan tersebut bisa juga digunakan sebagai air baku. Namun pihaknya sempat mendapat penjelasan dari pihak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bahwa air tersebut belum digunakan sebagai air baku.

Bahkan tidak itu saja. Seharusnya masih banyak hal lain yang bisa dimanfaatkan dari sebuah bendungan. Salah satunya adalah menggerakkan air menjadi energi turbin, yang pada akhirnya bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Selain tentunya tujuan utamanya, guna mencegah atau mengatasi banjir di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi Tangerang dan Bekasi).
Foto : dpr.go.id





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Focus Group Discussion (FGD)

SKANDAL JIWASRAYA Ada Apa dengan **BUMN?**

Sebagai Bentuk tanggungjawab kepada rakyat, PKS ingin perbaiki BUMN

*Kita ingin dorong perbaikan-perbaikan semua BUMN,
perusahaan pelat merah. Karena banyak BUMN yang
bermasalah. Ini merupakan bentuk pertanggung-
jawaban kami kepada rakyat, kepada publik.*

Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Amin Soroti Tata Kelola BUMN yang Kurang Baik

BUMN kita tidak berjaya karena kurangnya political commitment dari pemerintah. Padahal, pemerintah memiliki semua modal untuk itu, dari dana, SDM, SDA, jumlah pasar hingga kewenangan luas

AMIN AK, M.M

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (29/01) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Amin, Ak menyoroti tata kelola BUMN di Indonesia yang sampai saat ini masih kurang baik sehingga menimbulkan beban kepada negara.

Hal tersebut disampaikan Amin Ak dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS, Rabu, (29/01/2020).

Menurut Amin, BUMN kita belum bisa menjadi kebanggaan. Pada tahun 2018 Pemerintah hanya mendapat setoran deviden dari BUMN sebesar Rp 44 triliun. Padahal total aset BUMN pada tahun yang sama sebesar Rp 8.200 triliun. 80 % dari jumlah deviden tersebut disumbang oleh 14 perusahaan dari 142 BUMN di

Indonesia.

"BUMN kita tidak berjaya karena kurangnya political commitment dari pemerintah. Padahal, pemerintah memiliki semua modal untuk itu, dari dana, SDM, SDA, jumlah pasar hingga kewenangan luas", tegas Amin.

Lebih lanjut Amin yang juga Anggota Komisi VI DPR RI ini menyatakan Jika Good Corporate Governance (GCG) hanya jadi slogan tidak menjadi budaya, BUMN tidak akan bisa lebih baik.

"Pangkatan direksi dan komisaris BUMN harus berdasarkan pertimbangan profesionalitas, integritas dan kapabilitas. Kalau berdasarkan politik, koneksi, pertemanan dll, BUMN kita akan semakin terpuruk", tandas Amin.



Indonesia Mayoritas Muslim, Sertifikasi Halal Tidak Boleh Hilang di Omnibus Law

Indonesia ini kan penduduknya mayoritas Muslim. Prosentase Muslim Indonesia mencapai hingga 12,7 persen dari populasi dunia. Perkiraan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 269,6 juta jiwa tahun ini dengan 85,17 persen beragama Islam. Jadi sangat perlu sertifikasi halal produk itu ada pada regulasi tertinggi negara kita

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (27/01) -- Anggota DPR RI Komisi VI, Nevi Zuirina, yang turut pada panja perdagangan DPR RI akan bersama-sama fraksinya, FPKS, untuk menolak penghapusan sertifikasi halal di Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja.

Ia memandang bahwa Indonesia ini mayoritas penduduknya adalah Muslim. Perkiraan analisa data Global religius future, Indonesia pada 2020, penduduk muslimnya

mencapai 229,62 juta jiwa yang berarti Indonesia menjadi negara muslim terbesar dunia.

"Indonesia ini kan penduduknya mayoritas Muslim. Prosentase Muslim Indonesia mencapai hingga 12,7 persen dari populasi dunia. Perkiraan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 269,6 juta jiwa tahun ini dengan 85,17 persen beragama Islam. Jadi sangat perlu sertifikasi halal produk itu ada pada regulasi tertinggi negara kita" urai Nevi.

Tudingan segelintir pihak yang menyatakan bahwa investasi dan perekonomian akan terhambat bila masih ada kewajiban sertifikasi halal merupakan ide yang tidak bijak. Data sudah membuktikan bahwa Indonesia merupakan pasar sangat potensial Dunia yang berarti tidak semena-mena dalam menghancurkan benteng perlindungan pada keyakinannya.

"Sertifikasi halal untuk makanan ini membawa spirit healthy food, makanan yang aman, sehat bergizi dan aman dari segala efek samping bahan berbahaya baik kimia maupun rekayasa genetika", tegas Nevi.

Legislator Sumatera Barat ini meyakinkan kepada seluruh konstituennya di Sumatera Barat dan seluruh penduduk muslim di Indonesia, bahwa FPKS akan kompak dikomandoi Ketua Fraksi untuk menjadi terdapan mempertahankan kewajiban sertifikasi produk Halal.

"Regulasi ini telah dibahas sekian lama dengan berbagai pengkajian dan simulasi demi kenyamanan hidup di bumi Indonesia ini", tutup Nevi.



foto: dpr.go.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Harga Elpiji 3 Kg Batal Naik, FPKS akan Terus Kawal

Alhamdulillah, suara kami didengar. Selanjutnya FPKS, akan mengawal poin kesimpulan ini. Kami tidak setuju jika Pemerintah mengalihkan, apalagi mencabut subsidi gas melon. Karena anggaran subsidi itu sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang. Kalau Pemerintah mengubah atau menarik subsidi gas sama saja dengan melanggar Undang-Undang

Dr. H. Mulyanto, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

Saadiah: Bersyukur Komisi VII DPR Putuskan Tolak Kenaikan LPG 3 Kg

Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak akan ada pengalihan yang mengakibatkan kenaikan harga LPG 3 kg

SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (28/01) — Komisi VII DPR RI memutuskan agar pemerintah, lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak mengalihkan subsidi LPG 3 kg yang telah disepakati bersama antara DPR dan Pemerintah dalam APBN Tahun 2020.

Anggota Komisi VII, Saadiah Uluputty menjelaskan, kesepakatan Komisi VII diambil setelah dilakukan rapat bersama antara Menteri ESDM, Arifin Tasrif dan Komisi VII pada Senin (27/1, kemarin).

"Dengan keputusan ini, maka rencana pemerintah dengan membuat opsi mengalihkan subsidi LPG 3 kg yang berdampak terhadap kenaikan harga LPG 3 kg akhirnya batal. Alhamdulillah", jelas Saadiah Uluputty di

kompleks DPR RI Senayan Jakarta, Selasa (28/1).

Kabar soal rencana pencabutan subsidi LPG 3 kg oleh pemerintah cukup kontroversial. Sejumlah pihak menyampaikan keberatan atas opsi yang ditawarkan pemerintah untuk memberlakukan pengalihan subsidi LPG 3 kg pada semester ke 2 tahun 2020.

Reaksi penolakan keras ditunjukkan oleh sejumlah anggota Komisi VII saat rapat kemarin. Saadiah Uluputty, Anggota Komisi VII Dapil Provinsi Maluku ini tak dapat menyembunyikan kegelisahannya.

Ia menilai jika pemerintah sepihak membuat skema rencana pencabutan subsidi LPG 3 kg, Saadiah meminta

pemerintah tidak semena-mana dan membuat kebijakan sepihak dengan opsi cabut subsidi LPG 3 kg. Karena skema subsidi ditetapkan bersama DPR dan Pemerintah.

"Pemerintah dan DPR telah menetapkan secara bersama, besaran subsidi gas sebesar Rp 50,6 triliun dalam APBN 2020. Penetapan ini tentu saja didasari atas asumsi makro maupun mikro dan sejumlah daya dukung valid terutama yang berkaitan dengan data penerima manfaat subsidi LPJ 3 kg", sebut Saadiah.

Dia menyoroti sistem pemutakhiran data penerima subsidi yang bermasalah sejak awal. Dalam kurun waktu 2019, imbuh Saadiah, pos anggaran dengan realisasi terendah adalah Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang baru mencapai angka 62 %.

"Padahal validitas data adalah masalah serius yang harus segera diselesaikan sebagai prasyarat untuk penetapan bantuan subsidi yang tepat sasaran", sebutnya.

Maka menurutnya, pemerintah tidak peka jika memaksakan rencana untuk



mencabut subsidi LPG 3 kg dan menaikkan harganya. "Ini kebangetan, mencabut subsidi secara sepihak tapi amburadul dari sisi pemutakhiran kelompok sasaran penerima manfaat", cesar Saadiah.

Saadiah bersyukur karena rapat Komisi VII bersama Menteri ESDM memutuskan dengan meminta Menteri ESDM RI menyampaikan secara

terbuka kepada masyarakat bahwa tidak ada pengalihan subsidi LPG 3 kg.

"Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak akan ada pengalihan yang mengakibatkan kenaikan harga LPG 3 kg", tutup Saadiah.

Foto : dpr.go.id

Peran Pemerintah di Freeport Kurang Strategis, ini Saran PKS

Seharusnya Pemerintah mengkonsolidasikan diri dengan membuat skema saham yang lebih menguntungkan dan dapat menjadikan Pemerintah Indonesia sebagai pemegang kendali utama manajemen perusahaan. Soal ini harus diluruskan kembali agar investasi kita di Freeport sesuai dengan tujuan awalnya yaitu menegakkan kedaulatan ekonomi di sektor pertambangan

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (26/1) — Sebagai pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia (PTFI) ternyata Pemerintah tidak bisa menjadi pengendali utama manajemen perusahaan.

Hal ini disebabkan saham milik Pemerintah Indonesia sebesar 51% terpecah menjadi 41% atas nama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan 10% atas nama Pemerintah Provinsi Papua.

Dengan komposisi saham seperti ini maka PT. Freeport-McMoRan terkesan menjadi pemegang saham mayoritas

49% dan berhak memegang kendali utama manajemen perusahaan.

Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mulyanto menyayangkan komposisi seperti itu. Seharusnya Pemerintah mengkonsolidasikan diri dengan membuat skema saham yang lebih menguntungkan dan dapat menjadikan Pemerintah Indonesia sebagai pemegang kendali utama manajemen perusahaan.

"Soal ini harus diluruskan

kembali agar investasi kita di Freeport sesuai dengan tujuan awalnya yaitu menegakkan kedaulatan ekonomi di sektor pertambangan," ujar Mulyanto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan PT. Mind-ID, perusahaan induk (holding) BUMN Pertambangan.

Mulyanto mengingatkan nilai investasi Pemerintah untuk mendapatkan saham di PTFI sangat besar. Seharusnya Pemerintah bisa mengambil peran lebih besar lagi sehingga bisa membawa manfaat yang lebih banyak untuk bangsa Indonesia.

"Pemerintah harusnya menghayati betul alasan kenapa kita harus membeli 51% saham Freeport. Karena kita ingin berdaulat atas kekayaan alam yang dimiliki sebagaimana amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bukan sekedar investasi," tegas Wakil Ketua FPKS DPR-RI ini.

Untuk itu Mulyanto meminta Pemerintah memikirkan berbagai upaya yang perlu dilakukan agar spirit membeli saham PTFI ini bisa diwujudkan.

Foto : dpr.go.id





FRAKSI PKS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Selamat Harlah 94 Nahdlatul Ulama

31 Januari 1926 - 31 Januari 2020

*Semoga Tetap Konsisten
Mengawal Islam
Rahmatan Lil Alamin*

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si.,M.Psi.T

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

PKS Tanggapi 100 Hari Menteri Agama, Tidak Maksimal

“Menteri Agama juga seharusnya fokus memperbaiki citra Kemenag yang selalu tersangkut kasus Korupsi, juga memperbaiki Birokrasi di kementerianya, agar Pesantren-Pesantrean maupun sekolah-sekolah Islam yang ada di Indonesia bisa lebih maju

H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (01/02) — Anggota komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis menanggapi kinerja Menteri Agama yang sudah memasuki 100 hari kerjanya setelah dilantik oleh presiden pada 23/10/2019.

Iskan menyatakan masih banyak ketimpangan dan belum maksimalnya Kementerian agama dalam menjalankan tupoksinya.

“Alih-alih Fokus memperbaiki citra Kemenag, malah Menteri Agama beberapa kali melakukan blunder dan kontroversial yang malah menyebabkan masyarakat Indonesia resah dengan pernyataan-pernyataan beliau.” Tuturnya.

Sebelumnya Menteri Agama melakukan gebrakan

pertamanya dengan menyatakan ingin membatasi penggunaan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah.

Saat itu, kata Iskan, Fachrul bilang ada tren mengaitkan penggunaan cadar dan celana cingkrang dengan tingkat ketakwaan. Selain itu, ia juga menyinggung alasan keamanan.

“Kedua, Fachrul mengaggas sertifikasi penceramah guna merespons gerakan radikalisme yang sudah masuk ke mimbar-mimbar masjid”, sebutnya.

Menteri Agama menyatakan, saat ini banyak penceramah yang membodohi umat dengan menggunakan dalil-dalil agama.

Ketiga, lanjut Iskan, Menag

menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. “Aturan itu mengharuskan pendaftaran majelis di kantor Kementerian Agama untuk dapat Surat Keterangan Terdaftar”, ungkap Iskan.

Keempat, menurut Iskan, Kemenag merombak pelajaran agama Islam, terutama terkait khilafah. “Bentuknya, perombakan 155 judul buku pelajaran agama Islam. Beberapa di antaranya dirombak karena mencantumkan konten khilafah”, tandasnya.

Yang terakhir, lanjut Iskan, terkait isu khotbah Jumat, bahwa setiap khatib Jum’at diatur materi Khotbahnya oleh Kementerian Agama.

“Kemenag harus fokus pada tupoksinya, bekerja dalam hal-hal yang substantif, hentikan kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif. aturan itu saya menyebutnya bak Orde Baru yang mengekang kebebasan warganya untuk beribadah,” jelas Iskan.

Iskan mengatakan coba kita lihat tujuan negara ini yang tertuang dalam UUD 45, memajukan kesejahteraan, mencederakan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban



dunia, dan perdamaian yang abadi, maka Menteri Agama harus menjalankan tugas-tugasnya berlandaskan hal ini, hindari kebijakan atau pernyataan yang kontraproduktif.

“Menteri Agama juga seharusnya fokus memperbaiki citra Kemenag yang selalu tersangkut kasus Korupsi, juga memperbaiki Birokrasi di kementerianya, agar

Pesantren-Pesantrean maupun sekolah-sekolah Islam yang ada di Indonesia bisa lebih maju,” tambah Iskan.

Iskan menegaskan birokrasi di Kementerian Agama harus tersistematis, jangan ada sampai kesan mempersulit, supaya lembaga-lembaga pendidikan berbasis Islam dapat berkembang lebih maju.

Nur Azizah Tamhid Soroti Permukiman Ilegal di Kabupaten Bogor

Ini menyalahi aturan, yang semestinya tanaman dan pohon-pohon bisa menyerap air namun karena tidak ada sehingga air dari Gunung langsung turun membanjiri & merendam pemukiman warga. Seharusnya pengembalian fungsi-fungsi lahan harus sesuai aturan dan peruntukannya

Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Bogor (01/02) — Anggota DPR RI Komisi VIII Nur Azizah Tamhid melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jum'at, (31/01/2020).

Dalam kunjungan tersebut Nur Azizah Tamhid bersama Wakil Bupati Bogor, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kab Bogor & Kepala Dinas Sosial Kab Bogor di Ruang Rapat Kantor Bupati Bogor.

Pada kesempatan tersebut, Nur Azizah Tamhid, yang merupakan Anggota Fraksi

PKS Dapil Jabar VI (Kota Depok & Kota Bekasi) mempertanyakan pemukiman-pemukiman ilegal serta hutan2 yang gundul dan digunakan untuk pemukiman.

"hal ini menyalahi aturan, yang semestinya tanaman & pohon-pohon bisa menyerap air namun karena tidak ada sehingga air dari Gunung langsung turun membanjiri & merendam pemukiman warga," tegas Nur Azizah Tamhid.

Nur Azizah mengharapkan penanganan & langkah-langkah serius dari Pemkab Bogor,

dalam hal ini Wabup Bogor dan jajarannya dengan cara melakukan Reboisasi.

"Seharusnya pengembalian fungsi-fungsi lahan harus sesuai aturan & peruntukannya," paparnya.

Nur Azizah menambahkan untuk pemukiman ilegal yang tidak pada tempatnya agar di relokasi ke tempat yang legal & aman.



PKS Desak Pemerintah Kab. Bogor Lebih serius tangani Bencana

Bencana kemarin menimpa hingga 28 kecamatan dari 40 kecamatan yang ada. Hampir 70% bagian Bogor terendam dan hancur. Pemerintah kabupaten harus lebih aware dan care serta komprehensif dalam merencanakan pembangunan

KH. BUCHORI, Lc., M.A.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

Bogor (31/01) — Anggota komisi VIII DPR RI Bukhori mengatakan bahwa pemerintah kabupaten Bogor mengaku tidak siap menghadapi bencana yang terjadi pada awal tahun kemarin. BPBD kabupaten bogor mencatat hingga 41 kejadian bencana, 80% bencana banjir.

Ketua poksi dari Fraksi PKS ini mengatakan bencana kemarin menimpa hingga 28 kecamatan dari 40 kecamatan yang ada. Hampir 70% bagian Bogor terendam dan hancur.

“Pemerintah kabupaten

harus lebih aware dan care serta komprehensif dalam merencanakan pembangunan.” Ungkap Bukhori pada Kunsfik Komisi VIII di Bogor hari ini.

Selain itu Bukhori mengatakan bahwa cara menanggulangi bencana tidak semata hanya masalah dana melainkan kesadaran yang mendasar dan menyeluruh terhadap kondisi alam serta lingkungannya.

“Masalah hutan-hutan gundul yang menjadi penyebab bencana di kabupaten bogor khususnya di kecamatan

sukajaya HGU nya tolong segera di audit.” Ujar politisi Fraksi PKS

Lebih lanjut, Bukhori menyayangkan terhadap ketidaksiapan pemerintah kabupaten Bogor menghadapi bencana yang menimpa kemarin hingga menewaskan belasan orang.



Musholla Dirusak di Minahasa,

HNW: UU Perlindungan Tokoh & Simbol Agama Diperlukan

“Kita perlu memberi pengaturan khusus, terutama terkait perlindungan rumah ibadah, karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (31/01) — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi VIII yang membidangi urusan agama Hidayat Nur Wahid mengecam perusakan tempat ibadah umat Islam di Minahasa Utara dan menilai bahwa perusakan tersebut merupakan bukti perlunya UU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.

Hidayat mengapresiasi langkah kepolisian yang segera bertindak menangkap pelaku perusakan.

“Polisi diharapkan bisa menegakkan hukum secara adil dan benar, agar para tokoh serta umat beragama tidak terpancing atau memancing terjadinya masalah atau konflik yang lebih besar,” ujar pria yang akrab disapa HNW ini, Jumat (31/01).

Informasi dari Kepolisian,

para pelaku akan dijerat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni Pasal 170 yang mengatur penggunaan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama dan Pasal 406 yang mengatur tindakan melawan hukum menghancurkan, merusakkan seluruh atau sebagian milik orang lain.

“Upaya cepat kepolisian perlu diapresiasi, tetapi pasal yang digunakan masih bersifat umum. Padahal, perusakan tempat ibadah seharusnya diperlakukan berbeda dengan perusakan tempat atau barang secara umum,” ujarnya.

HNW mengatakan bahwa tempat ibadah merupakan salah satu simbol agama dalam Rancangan Undang-Undang

Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama yang akan dibahas di DPR pada 2020 ini.

“Kita perlu memberi pengaturan khusus, terutama terkait perlindungan rumah ibadah, karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius,” turnya.

Lebih lanjut, HNW menjelaskan bahwa peristiwa perusakan rumah ibadah sebenarnya dapat dihindarkan apabila terciptanya dialog antar tokoh agama di lingkungan setempat yang selama ini belum berjalan dengan lancar.

Ia mengungkapkan bahwa RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama juga akan mengatur ketentuan mengenai dialog tokoh agama sehingga masing-masing pihak dapat saling memahami dan bertoleransi yang diharapkan dapat diturunkan kepada umat agama tersebut di masyarakat.

“Kami juga memasukkan ketentuan terkait dialog tokoh agama dari tingkat nasional maupun daerah, bahkan hingga desa atau kelurahan di RUU tersebut. Harapannya agar di Indonesia tidak ada lagi peristiwa perusakan tempat



ibadah, bukan hanya tempat agama Islam tetapi juga agama apapun yang diakui di Indonesia,” tukas penasihat KAICIID, lembaga internasional yang fokus kepada dialog antar agama (keyakinan) dan budaya, ini.

HNW menambahkan salah satu tujuan utama RUU tersebut diusulkan adalah juga untuk mencegah terjadinya radikalisme dan tindakan intoleran sebagaimana yang terjadi dalam perusakan musholla atau masjid tersebut.

Sebagai informasi, RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 yang akan dibahas tahun ini.

RUU ini diusulkan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta juga oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) yang ingin memasukkan perlindungan terhadap kyai dan guru ngaji ke dalam RUU tersebut.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Pembu

Dr. H. Jazuli Juwaini

Ketua Fraksi PKS D

DKR Harap ada Perbaikan Kebijakan Permenkes Nomor 3 tahun 2020

Yang paling saya tekankan kepada pemerintah adalah, pada Sistem Pembayaran BPJS akan menggunakan single tarif/tarif tunggal, yakni Tidak ada lagi kelas 1,2, atau 3 sesuai Undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial. Saya menyarankan kepada pemerintah, agar pada penerapan single tarif iuran berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, bukan atas dasar survey

dr. H. Adang Sudrajat, M.M., Av
Anggota Komisi IX DPR RI



DPR Harap ada Perbaikan Kebijakan Permenkes Nomor 3 tahun 2020

Yang paling saya tekankan kepada pemerintah adalah, pada Sistem Pembayaran BPJS akan menggunakan single tarif/tarif tunggal, yakni Tidak ada lagi kelas 1,2, atau 3 sesuai UU tentang Sistem Jaminan Sosial. Saya menyarankan kepada pemerintah, agar pada penerapan single tarif iuran berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, bukan atas dasar survey",

dr. H. ADANG SUDRAJAT, M.M.,Av

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (01/02) — Anggota Komisi IX DPR, Adang Sudrajat, pasca advokasi mempertahankan tarif BPJS kelas III bersama seluruh rekan di fraksi dan Komisi, kini berharap ada perbaikan pada sistem kesehatan nasional, pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 yang ditetapkan pada, (14/01/2020).

Politisi PKS ini mengharap, pemerintah melakukan

sosialisasi penjelasan sederhana kepada seluruh masyarakat agar mampu memahami situasi regulasi kesehatan di negaranya.

"Banyak perubahan mendasar dari Permenkes Nomor 3 tahun 2020 ini. Mulai dari klasifikasi Rumah Sakit berdasar jumlah Tempat Tidur, Sistem Pembayaran BPJS akan menggunakan single tarif/tarif tunggal, hingga INA CBGs akan diganti dgn INA GROUPING,

dengan tarif tunggal", urai Politisi PKS ini.

Legislator asal Jawa Barat II ini meminta kepada pemerintah bahwa, dengan adanya Permenkes nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, penerapannya akan membawa perbaikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberi kenyamanan kepada seluruh tenaga medis dalam menjalankan tugasnya.

"Rumah Sakit dipersilakan untuk memperluas SDM dan sarana prasarana, karena rujukan akan berdasarkan ketersediaan SDM dan kompetensi. Tidak ada lagi sistem rujukan berjenjang," ungkapnya.

Adang menambahkan Rumah Sakit tipe apa saja bisa merujuk ke Rumah Sakit tipe apa saja, asalkan di Rumah Sakit tujuan bisa dan mampu menangani pasien tersebut.

"Semoga kebijakan ini membawa ke arah yang lebih baik", Ujarnya.

Berdasar Permenkes nomor 3 tahun 2020, Rumah Sakit diklasifikasi berdasar

jumlah tempat tidur sebagai berikut : Rumah Sakit Type A memiliki 250 Tempat Tidur. Rumah Sakit Type B memiliki 200 Tempat Tidur. Rumah Sakit Type C memiliki 100 Tempat Tidur. Dan Rumah Sakit Type D memiliki 50 Tempat Tidur. Sedangkan Pelayanan Medik di Rumah Sakit tetap dibagi menjadi 3 Kategori, yaitu: Pelayanan Medik Umum, berupa Pelayanan Medik Dasar; Pelayanan Medik Spesialis berupa Pelayanan Medik Dasar (P.Dalam, Anak, Bedah, Obgyn) dan Pelayanan Medik Spesialis Lain; serta Pelayanan Medik Subspesialis berupa Pelayanan Subspesialis Dasar dan Pelayanan Subspesialis Lain

Dokter Adang mengatakan, Lahirnya PMK No 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit pada tanggal 14 Januari 2020 dan telah diundangkan pada tanggal 16 Januari 2020, menjadikan Permenkes No 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Per-

izinan Rumah Sakit dinyatakan telah dicabut dan tidak berlaku.

"Yang paling saya tekankan kepada pemerintah adalah, pada Sistem Pembayaran BPJS akan menggunakan single tarif/tarif tunggal, yakni Tidak ada lagi kelas 1,2, atau 3 sesuai Undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial. Saya menyarankan kepada pemerintah, agar pada penerapan single tarif iuran berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, bukan atas dasar survey", tegas dia

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Bertemu Walikota Surabaya

Netty Dorong Kepemimpinan Perempuan dalam Politik

Kita mengenal Cut Nyak Dien, Panglima Malahayati, Ratu Kalinyamat, Christina Marta Tiahahu dan banyak lainnya yang telah menjadi inspirator bagi perempuan Indonesia dalam berkontribusi untuk NKRI melalui peran kepemimpinan di berbagai bidang

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.

Anggota Legislatif Perempuan Fraksi PKS DPR RI

Surabaya (01/02) — Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap peran kepemimpinan perempuan? "Jika ukurannya kinerja Walikota Surabaya, saya tidak ragu-ragu lagi untuk mengatakan bahwa kepemimpinan perempuan dalam politik diterima dengan sepenuh hati oleh rakyat," demikian Netty Prasetyani, usai melakukan kunjungan kerja Komisi IX ke Surabaya dalam rangka pemantauan program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga), Kamis (30/1).

Menurut Netty, peran kepemimpinan perempuan

dalam politik di Indonesia bukanlah hal baru.

"Kita mengenal Cut Nyak Dien, Panglima Malahayati, Ratu Kalinyamat, Christina Marta Tiahahu dan banyak lainnya yang telah menjadi inspirator bagi perempuan Indonesia dalam berkontribusi untuk NKRI melalui peran kepemimpinan di berbagai bidang," ungkapnya.

Sejarah modern bangsa Indonesia pun, kata Netty, mencatat perempuan sebagai bupati, walikota, gubernur, menteri, ketua lembaga legislatif, bahkan presiden.

"Peluang itu terbuka luas meski masih banyak tantangan,

baik dari sisi personal, kultural, mau pun regulasi. Hadapi semua tantangan tersebut dengan tegar dan gagah berani. Sebab tantangan adalah ujian penaklukan bukan untuk ditangisi atau dikeluhkan," pungkasnya.

Netty meminta perempuan yang terjun di politik bercermin pada Walikota Surabaya.

"Bu Risma dengan program pro rakyat semisal makanan bergizi gratis, kali bersih, taman kota, pengolahan sampah dan pembinaan UKM lokal untuk kesejahteraan keluarga telah mampu mengambil hati warga Surabaya," tutur istri dari Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ini.

Dimintai komentarnya tentang partisipasi perempuan dalam pilkada serentak September 2020, Netty mengatakan bahwa pilkada dapat menjadi jalan tol bagi perempuan politik dalam membangun popularitas dan elektabilitas dengan maju mendaftarkan diri sebagai bakal calon ke partai-partai.

"Daftar aja dulu. Apakah nanti dapat dukungan partai



atau tidak, soal lain. Perlu dorongan dan political will dari pimpinan parpol agar perempuan tidak sungkan untuk maju," tandasnya.

Bagaimana dengan Netty sendiri, apakah siap maju

dalam pilkada 2020? "Wah, saya sedang serius menjalani peran sebagai wakil rakyat di DPR RI," ujar Netty sambil tertawa menutup pembicaraan.

Komisi IX DPR apresiasi Program KB yang terintegrasi di Kota Surabaya

Kalau saya berpendapat memang ini (penerapan program KB) yang terbaik untuk di seluruh Indonesia. Dari semuanya, mulai dari Bina Keluarga Balitanya, Bina Keluarga Remajanya, sampai kepada Bina Keluarga Lansia,

H. ANSORY SIREGAR, Lc

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Pemerintah Kota Surabaya sangat serius mendukung penerapan program Keluarga Berencana (KB) dengan melakukan berbagai program dan terobosan. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Program KB di Kota Surabaya dilakukan secara terintegrasi dan inklusif dengan program pembangunan masyarakat lainnya.

Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ansory Siregar, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelesaikan program KB. Di mana, Program KB di Kota Surabaya diintegrasikan dengan program Konselor

Sebaya di sekolah-sekolah, terhubung dengan Pusat Perbelanjaan Keluarga yang ditujukan bagi keluarga, serta Kampung Pendidikan yang mengedukasi masyarakat.

"Kalau saya berpendapat memang ini (penerapan program KB) yang terbaik untuk di seluruh Indonesia. Dari semuanya, mulai dari Bina Keluarga Balitanya, Bina Keluarga Remajanya, sampai kepada Bina Keluarga Lansia," puji Ansory usai mendengar pemaparan penerapan program KB oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (30/1/2020).

Politisi Fraksi PKS ini melanjutkan, melalui berbagai terobosan, Kota Surabaya juga berhasil mengendalikan

populasi penduduk melalui ketahanan keluarga. Hal ini menjadi penting, mengingat Indonesia akan menghadapi bonus demografi di tahun-tahun mendatang.

"Kalau tidak dikendalikan dan mengambil manfaat dari bonus demografi. Saya kira di tahun 2030 atau 2035 kita bukan hanya mendapat bonus demografi, tapi bahaya demografi, karena tidak bisa mengendalikannya," terangnya.

Oleh karena itu, Tim Kunspek Komisi IX DPR RI ke Kota Surabaya sangat mengapresiasi program pengendalian penduduk dan ketahanan keluarga yang telah diterapkan di Kota Surabaya dalam rangka menyambut datangnya bonus demografi di tahun-tahun mendatang. "Mudah-mudahan ini dicontoh oleh kota-kota lain di Indonesia," tambahnya.

Dalam paparannya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjelaskan, Program ketahanan keluarga yang diterapkan di Kota Surabaya sangat penting. Karena akan sangat berpengaruh terhadap masa depan anak yang kelaknya akan meneruskan estafet bangsa. Apapun yang terjadi di negara



ini kedepannya, akan bergantung pada pendidikan terhadap anak-anak.

"Saya selalu sampaikan kepada masyarakat Surabaya, keberhasilan kita adalah saat kita bisa membuat anak-anak kita berhasil dan sukses. Penanganan yang kita lakukan terhadap anak, harus komprehensif. Jadi tidak bisa dari sisi ayah, ibu atau anaknya saja. Makanya ketika ada masalah kita penanganannya semuanya," jelasnya.

Pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI ke Kota

Surabaya untuk mengakselerasi keberhasilan program KB di Surabaya. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Perwakilan BKKBN Pusat, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Provinsi Jatim, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya, Pusar Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Surabaya, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).

Foto : dpr.go.id

Kunjungi NTB, Netty Minta Pemerintah Serious Kelola Tenaga Kerja Migran

Tantangan bagi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah melalui BP3TKI, Dinas Tenaga Kerja, dan PPTKIS untuk bersungguh-sungguh menyelenggarakan pelatihan dan pembekalan agar pekerja Indonesia dapat bekerja dengan baik dan aman di negara tujuan bekerja.

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Lombok (28/01) – Anggota DPR RI, Netty Prasetyani melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi NTB pada 23 Januari 2020. Dalam kunjungan kerja itu Netty menyortir terkait tantangan pemerintah dalam memberikan pelatihan dan pembekalan bagi para PMI.

Menurut Netty, NTB termasuk diantara 4 provinsi pengirim PMI terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Netty melihat bahwa Pemerintah Daerah dan seluruh

pemangku kepentingan perlu bersungguh-sungguh dalam menyelenggarakan program pembangunan bidang ketenagakerjaan khususnya penanganan permasalahan pekerja migran.

"Dari banyak sumber tidak kurang tujuh juta warga kita memilih bermigrasi kerja ke berbagai negara tetangga," ungkap Netty.

Menurut BP3TKI, penempatan PMI pada 2018 mencapai 283.640. Dari jumlah itu 133.640 pekerja di sektor

formal dan 150 ribu pekerja bekerja di sektor informal.

"Sayangnya, dari jumlah tersebut, hanya 3,5 persen yang berlatarbelakang pendidikan tinggi sehingga kebanyakan PMI bekerja sebagai 'domestic worker', 'care giver', dan 'plantation worker' atau mendapatkan pekerjaan yang sering disebut 3D yakni dangerous, dirty, and difficult", tambahnya.

Dalam pandangan Netty, langkah serius yang harus dilakukan adalah sosialisasi tentang kesadaran dan persiapan bermigrasi kerja ke luar negeri. Hal ini penting karena PMI didominasi oleh lulusan SMP tetap mendominasi para tenaga kerja Indonesia sebanyak 101.824 pekerja atau sekitar 36% dan PMI lulusan SD sejumlah 97.209 pekerja atau sekitar 34%.

"Kalau melihat profil pendidikan PMI, ada hal lain yang harus dipahami selain persyaratan keterampilan bekerja seperti aspek sosial budaya, komunikasi, dan adat istiadat yang harus dipahami



dengan baik", terangnya.

Menurut Netty yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS ini, tantangan bagi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah melalui BP3TKI, Dinas Tenaga Kerja, dan PPTKIS untuk bersungguh-sungguh menyelenggarakan pelatihan dan pembekalan agar pekerja Indonesia dapat bekerja dengan baik dan aman di negara tujuan bekerja. Tahun 2019, BP3TKI melaporkan skema penempatan PMI dengan skema P to P mendominasi skema penyaluran PMI ke luar negeri sekitar 85% mencapai

240.819 dari total 283.640 pekerja Indonesia.

"Agar kelak dapat meningkatkan keterampilan bekerja sesuai kebutuhan dan permintaan serta memperbanyak penempatan PMI dengan skema G to G (antar pemerintah) yang lebih aman dibandingkan skema yang lain. Juga pemerintah harus meningkatkan pengawasan pada skema swasta karena jumlahnya yang sangat banyak", ungkapnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DPR Minta Nadiem Jadikan Pemetaan SDM Kunci Kebijakan

Kalau persoalan pemetaan SDM Pendidikan kita belum dituntaskan, dikhawatirkan program-program yang bagus akan menjadi mubazir dan tidak efektif karena belum terlihat apa yang dibutuhkan, apa yang tersedia, siapa pelaksana, siapa pengawas, berapa banyak dan lain-lain.

Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T
Anggota Komisi X DPR RI

DPR Minta Nadiem Jadikan Pemetaan SDM Kunci Kebijakan

Kalau persoalan pemetaan SDM Pendidikan kita belum dituntaskan, dikhawatirkan program-program yang bagus akan menjadi mubazir dan tidak efektif karena belum terlihat apa yang dibutuhkan, apa yang tersedia, siapa pelaksana, siapa pengawas, berapa banyak dan lain-lain.

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si.,M.Psi.T

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (29/01) --- Berbagai terobosan kebijakan Nadiem Makarim sebagai Mendikbud baru dikhawatirkan mubazir dan tidak efektif oleh anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah. Hal itu disebabkan ada persoalan mendasar terkait pemetaan SDM yang belum tuntas.

"Banyak kebijakan yang kita sama inginkan menjadi pendorong bagi kemunculan SDM Unggul masa depan. Seperti revitalisasi pendidikan vokasi, asesmen karakter dan talenta peserta didik, penataan sistem di perguruan tinggi maupun link and match dunia kampus dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Namun sayangnya pertanyaan

mendasar terkait profil SDM kita di dalam dunia pendidikan belum ada." Kata Ledia membuka kritisinya usai rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, Selasa, (28/01/2020).

Aleg PKS ini menyebut pemetaan SDM ini menjadi penting dituntaskan karena menjadi landasan kunci strategi kebijakan yang akan digulirkan.

Untuk perwujudan program pemetaan karakter dan talenta peserta didik misalnya, kata Ledia, siapa yang akan melakukannya? Link and Match dunia kampus dengan DUDI, apa saja yang dibutuhkan, berapa banyak, mana yang sudah tersedia dan belum? Kebijakan Merdeka

Belajar hingga tiap perguruan tinggi bisa membuka prodi baru, maka kebutuhan apa yang ada, apa yang tersedia, berapa banyak?

"Kalau persoalan pemetaan SDM Pendidikan kita belum dituntaskan, dikhawatirkan program-program yang bagus akan menjadi mubazir dan tidak efektif karena belum terlihat apa yang dibutuhkan, apa yang tersedia, siapa pelaksana, siapa pengawas, berapa banyak dan lain-lain. Tanpa pemetaan SDM ini pula lulusan SMK dan Prodi di kampus bisa tidak sesuai kebutuhan riil masyarakat di sekitarnya."

Sebagai contoh papar Ledia lagi, prodi terkait kesehatan yang dimoratorium karena anggapan bahwa tenaga medis sudah terlalu banyak.

"Kenyataannya untuk semisal Papua dan wilayah timur lainnya masih kekurangan tenaga kesehatan yang tidak selalu bermakna dokter, melainkan termasuk bidan, perawat dan tenaga kesehatan lain. Sementara meminta tenaga kesehatan dari katekanlah Jawa untuk bertugas di Papua ternyata juga tidak mudah."



Karena itu Sekretaris Kemendikbud segera melakukan pemetaan SDM sesegera mungkin seiring perencanaan kebijakan program.

"Sebab kita tentu sama berharap program-program baik untuk pencapaian SDM Unggul masa depan itu bisa terlaksana dengan tepat guna, tepat sasaran dan sesuai anggaran." tutup Ledia.

Sakinah Desak Pemerintah Tuntaskan Permasalahan Guru Honorer

“Tentu kita semua yang ada di ruangan ini termasuk pak menteri, kita semua berhasil atas didikan guru. Kita tidak akan melupakan jasa-jasa mereka yang sudah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada kita dan kepada generasi anak bangsa selanjutnya dan ini patut untuk kita perjuangkan

Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag.

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (30/01) — Sakinah Aljufri Anggota DPR F PKS mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan nasib guru honorer yang sampai saat ini tidak kunjung selesai.

Desakan tersebut disampaikan Sakinah di sela-sela Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di ruang rapat Komisi X Selasa, (28/1/2020).

“Kita tadi menyaksikan

bapak dan ibu guru honorer menangis di ruangan ini memohon status mereka diperjelas,” ungkap Sakinah.

Sakinah memaparkan masih banyak guru honorer yang mendapatkan gaji Rp 150 ribu perbulan dengan sistem penggajian tiga bulan sekali.

“Saya teringat dengan peribahasa Arab yang berbunyi sabar itu memang awalnya pahit, tapi pada akhirnya lebih manis dari madu. Tapi sampai kapan mereka akan menunggu

itu? 23 tahun pak mereka mengajar dengan gaji 150.000 dan turun per tiga bulan.” Papar politisi PKS asal Sulawesi Tengah.

“Tentu kita semua yang ada di ruangan ini termasuk pak menteri, kita semua berhasil atas didikan guru. Kita tidak akan melupakan jasa-jasa mereka yang sudah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada kita dan kepada generasi anak bangsa selanjutnya dan ini patut untuk kita perjuangkan.”tutup



DPR Desak Pemerintah Selesaikan Status Pegawai K2

“DPR RI mendorong Pemerintah agar memvalidasi data tenaga honorer K2 secara teliti. DPR RI mendorong Pemerintah untuk memasukkan anggaran penyelesaian tenaga honorer K2 dalam nota keuangan RAPBN 2019 lalu

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Jakarta (30/01) — Komisi X DPR RI kembali mendesak dan mengingatkan pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan status Pegawai Kategori 2 (K2) di seluruh instansi Pemerintah, terutama tenaga guru dan dosen. Tahun 2021 nanti, diupayakan tidak ada lagi tenaga honorer. Yang ada hanya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Demikian mengemuka saat rapat dengar pendapat umum Komisi X DPR RI dengan komunitas guru honorer Indonesia, di Ruang Rapat Komisi X, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menegaskan, Pemerintah

dan DPR RI sudah sepakat menyelesaikan masalah ini, karena ada total 438.590 tenaga honorer K2 di berbagai bidang yang belum diselesaikan status kepegawaianya.

“DPR RI mendorong Pemerintah agar memvalidasi data tenaga honorer K2 secara teliti. DPR RI mendorong Pemerintah untuk memasukkan anggaran penyelesaian tenaga honorer K2 dalam nota keuangan RAPBN 2019 lalu. Berdasarkan hasil rapat gabungan tanggal 23 Juli 2018, Komisi X DPR RI telah meminta kepada Pemerintah menindaklanjuti permasalahan tenaga honorer K2 agar segera diselesaikan,” papar Fikri.

Legislator F-PKS DPR RI ini

mengingatkan kembali hasil rapat gabungan DPR RI dengan pemerintah 23 Juli 2018 lalu, bahwa penyelesaian honorer K2 dilakukan secara bertahap, yaitu dengan tes CPNS, tes PPPK, dan mengangkat honorer sisanya menjadi pegawai dengan gaji sesuai upah minimum regional (UMR) di wilayahnya. Jumlah honorer K2 sebanyak 438.590 tersebut terdiri dari guru 157.210, dosen 86, tenaga kesehatan 6.091, penyuluh 5.803, dan tenaga administrasi 269.400.

Dari jumlah tersebut, sambung Fikri, yang memenuhi ketentuan mengikuti CPNS sebanyak 13.347 saja dengan rincian 12.883 guru, 446 tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh yang belum ditentukan jumlahnya. Penanganan tenaga honorer K2 sebanyak 425.243 sisanya dan yang tidak lulus tes CPNS akan diselesaikan dengan membuka kesempatan tes PPPK. Bila tak lulus juga, maka akan diangkat menjadi pegawai Pemerintah dengan gaji sesuai UMR di wilayahnya.

“Jadi skemanya ada tiga, CPNS, PPPK, dan tenaga dengan UMR. DPR RI mendorong Pemerintah agar



memvalidasi data tenaga honorer K2 secara teliti. DPR RI juga mendorong Pemerintah untuk memasukkan anggaran penyelesaian tenaga honorer K2 dalam Nota Keuangan RAPBN 2019 lalu. Berdasarkan

hasil rapat gabungan tanggal 23 Juli 2018 tersebut, Komisi X DPR RI telah meminta kepada Pemerintah agar menindaklanjuti permasalahan tenaga honorer K2 segera diselesaikan,” urai Fikri lagi.

Hanya Berbilang Bulan, Kesiapan UN Terakhir Harus Tetap Maksimal

“Persoalan-persoalan yang kerap mengemuka dalam Ujian Nasional ini harus dihilangkan sampai kalau bisa mencapai titik nol. Apalagi untuk wilayah Indonesia yang berada di pedesaan, pedalaman. Soal kelengkapan dan distribusi soal, ketersediaan perangkat komputer dan kepastian jaringan listrik dan internet semestinya bisa diantisipasi sejak sekarang, dalam waktu yang hanya tersisa dalam hitungan dua tiga bulan

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (27/01) — UN 2020 ditegaskan Mendikbud menjadi Ujian Nasional terakhir sebelum berganti menjadi evaluasi bermodel asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang dilakukan saat siswa berada di tengah jenjang pendidikan, yakni di kelas IV, VIII, dan XI. Meski merupakan ujian “penutupan” anggota Komisi X Ledia Hanifa meminta pemerintah tetap mempersiapkan Ujian Nasional ini secara sungguh-sungguh.

“Selama ini Ujian Nasional, Baik Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) Serta Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) masih belum berjalan mulus, ada saja hambatan. Makanya meski UN 2020 ini merupakan ujian nasional terakhir, saya berharap persiapannya tetap diupayakan secara maksimal,” ungkap Ledia.

Hambatan teknis dan sosial terkait ujian nasional memang masih kerap

mengemuka. Soal yang terhambat, rusak, tertukar masih terjadi pada model UNKP. Sementara perangkat ujian yang tidak memadai, baik dari sisi jumlah maupun kualitas, jaringan listrik dan internet yang tidak stabil, masih banyak dikeluhkan sekolah-sekolah penyelenggara UNBK. Dan dia atas semua itu kejadian bocoran soal ujian kerap menodai semangat ujian nasional yang seharusnya dilaksanakan atas dasar kejujuran siswa, guru dan tenaga kependidikan lain.

“Persoalan-persoalan yang kerap mengemuka dalam Ujian Nasional ini harus dihilangkan sampai kalau bisa mencapai titik nol. Apalagi untuk wilayah Indonesia yang berada di pedesaan, pedalaman. Soal kelengkapan dan distribusi soal, ketersediaan perangkat komputer dan kepastian jaringan listrik dan internet semestinya bisa diantisipasi sejak sekarang, dalam waktu yang hanya tersisa dalam hitungan dua tiga bulan,” kata Ledia

Aleg Fraksi PKS ini memahami bahwa persiapan ujian ini mungkin terasa lebih berat bagi sekolah yang tengah



memiliki banyak peer terutama terkait perubahan-perubahan mendasar dalam regulasi kependidikan.

“Aturan Sistem Zonasi, persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pastilah memakan banyak energi dari pihak sekolah. Apalagi dengan tantangan untuk mempersiapkan perubahan sistem evaluasi bagi siswa yang akan berlaku mulai 2021.

Namun sekali lagi, persiapan UN tak boleh menjadi terlemahkan. Jangan sampai ada pikiran; ah, santuy saja. tahun depan toh udah nggak ada lagi ... tapi justru bagaimana bisa mempersiapkan agar UN terakhir ini justru ditutup dengan skor penyelenggaraan dan skor integritas terbaik,” pungkas Ledia

Foto : dpr.go.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Pertumbuhan Rendah, Anis : BI dan Pemerintah Harus Perkuat Perekonomian Dalam Negeri

kuartal III tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia meleset dari target 5,3 % dengan capaiannya yang hanya 5,02 %. Indikator pertumbuhan ekonomi yang kurang baik di tahun 2020 dikemukakan oleh Anis berdasarkan pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan belum membaik di 2020

Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag.,M.Si.

Anggota Komisi XI DPR RI

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag. M.Si
Anggota Tim Kerja

Pertumbuhan Rendah

Anis: BI dan Pemerintah Harus Perkuat Perekonomian Dalam Negeri

pemerintah harus memacu perekonomian di dalam negeri atau memperkuat perekonomian domestik. Sementara yang terjadi sekarang adalah sebaliknya, unsur-unsur yang memperkuat perekonomian dalam negeri sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si.

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (28/01) -- Optimisme Bank Indonesia (BI) yang menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh dan membaik di tahun 2020 mendapat catatan kritis dari anggota DPR RI Komisi XI dari fraksi PKS Anis Byarwati.

"Rasa optimis akan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 yang disampaikan pak Gubernur BI, tidak sesuai dengan realita lapangan yang dirasakan masyarakat," ujarnya.

Dalam rapat kerja BI dengan Komisi XI DPR RI yang digelar di Gedung parlemen pada Senin, (27/01/2020), Anis memaparkan beberapa

fakta di lapangan.

Ia menyebutkan bahwa pada kuartal III tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia meleset dari target 5,3% dengan capaiannya yang hanya 5,02 %.

"Indikator pertumbuhan ekonomi yang kurang baik di tahun 2020 dikemukakan oleh Anis berdasarkan pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan belum membaik di 2020", ujarnya.

Menurut Anis, Kondisi ini membuat sektor ekspor tidak bisa menjadi andalan untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Hal ini berarti bahwa

pemerintah harus memacu perekonomian di dalam negeri atau memperkuat perekonomian domestik. Sementara yang terjadi sekarang adalah sebaliknya, unsur-unsur yang memperkuat perekonomian dalam negeri sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja", papar Anis.

Berdasarkan survey AC Nielsen, pertumbuhan ekonomi dalam negeri Indonesia sangat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga. Kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai 60% terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Dengan kenaikan harga bahan pokok dan kenaikan iuran kesehatan BPJS, tentunya akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga" paparnya.

Selain itu, kata Anis, konsumsi swasta juga akan diperkirakan menurun seiring dengan kebijakan pemerintah menghapus subsidi listrik untuk konsumsi 900 VA. Ditambah konsumsi pemerintah juga diperkirakan menurun seiring dengan penerimaan negara diperkirakan juga menurun.

"Harga komoditas yang lemah, nilai ekspor dan nilai



impor yang rendah serta penerimaan pajak yang tidak pernah mencapai target bahkan selalu mengalami *short fall* dalam jumlah yang sangat besar, menjadi indikator lain lemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia", ungkap Anis.

Sementara disisi lain, menurut Anis, iklim investasi juga diprediksi menurun seiring kondisi ekonomi dunia yang melambat. Para investor akan lebih banyak menunggu dan melihat di tengah situasi

ekonomi yang stagnan bahkan cenderung menurun.

Anis mempertanyakan apa langkah-langkah riil yang akan diambil BI dalam kondisi ekonomi negara seperti yang dipaparkannya diatas.

"Jangan sampai masyarakat diberikan pemanis-pemanis seolah ekonomi baik-baik saja padahal sesungguhnya jauh dari realita di lapangan" katanya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id / Foto : dpr.go.id

Skandal Jiwasraya Sangat Realistis dibentuk Pansus

Adalah ganjil jika usul pansus angket skandal Jiwasraya ditentang. Karena, pada prinsipnya langkah tersebut dilakukan untuk mendorong transparansi terkait kasus Jiwasraya dan merumuskan berbagai alternatif penyelesaian

H. ECKY AWAL MUCHARAM

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (31/01) — Ecky Awal Mucharam Anggota DPR RI Komisi XI, menjelaskan bahwa pansus angket skandal Jiwasraya sangat realistis dan relevan untuk dilakukan, mengingat hal tersebut menyangkut dana publik dan merupakan badan usaha milik negara (BUMN).

"Jadi, wajar dan realistis ketika rakyat ingin tahu apa yang terjadi dengan dana yang mereka titipkan," kata Ecky di Senayan, Jakarta (31/1/2020).

"Sejak skandal Jiwasraya, Fraksi PKS terus mengawal hingga persoalan tersebut tuntas. Kita melihat bahwa banyak hal yang janggal dan

tidak terungkap pada skandal Jiwasraya. Lagi-lagi nasabah yang akan dirugikan karena tata kelola perusahaan buruk dan ketidaktegasan otoritas," ujar Ecky.

Kejaksaaan Agung menyatakan Asuransi Jiwasraya berpotensi merugikan negara hingga Rp13,7 triliun, lebih dua kali lipat dari skandar Bank Century.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan, secara prinsip, industri jasa keuangan berbasis lewat kepercayaan publik melalui penghimpunan dana dan kemudian menyalurkannya ke berbagai instrumen, kepercayaan publik

harus terus dijaga dengan baik.

"Adalah ganjil jika usul pansus angket skandal Jiwasraya ditentang. Karena, pada prinsipnya langkah tersebut dilakukan untuk mendorong transparansi terkait kasus Jiwasraya dan merumuskan berbagai alternatif penyelesaian," kata Ecky.

"Salah satu alat politik yang diamanatkan undang-undang untuk memenuhi kepentingan rakyat adalah lewat hak angket. Melalui hak angket inilah persoalan Jiwasraya dapat diinvestigasi secara mendalam, sehingga dituntaskan dengan adil dan akuntabel," tutup Ecky.



Peduli Lingkungan, DPR Dorong Mahasiswa Jadi Agen Perubahan

“Perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Hal ini dapat dimulai dengan satu langkah kecil, tetapi berdampak besar, yaitu hidup bersih dari sampah, mari kita mulai dari diri sendiri

Dr. H. R. A. DIMYATI NATAKUSUMAH, MH

Wakil Ketua BURT DPR RI

Manusia dan lingkungan tidak dapat terpisahkan. Lingkungan sebagai tempat dan pendukung kelangsungan kehidupan manusia tentu memerlukan peranan masyarakat untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungannya. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah mengatakan, permasalahan lingkungan yang dihadapi saat ini sangat kompleks. Mulai dari polusi udara, bencana alam hingga perubahan iklim. Tentunya, kondisi ini telah mengancam kehidupan manusia.

Karena itu, menurut Dimiyati, dibutuhkan kesadaran bersama untuk menjaga alam

dan lingkungan. “Perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Hal ini dapat dimulai dengan satu langkah kecil, tetapi berdampak besar, yaitu hidup bersih dari sampah, mari kita mulai dari diri sendiri,” ungkap Dimiyati saat membuka acara Parlemen Kampus 2020 dengan tema “Darurat Pencemaran Lingkungan” yang bertempat di Auditorium Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ), Cirebon, Jawa Barat, Kamis (30/1/2020).

Turut hadir dalam acara tersebut, Anggota DPR RI Dyah Roro Esti (F-Golkar, Jawa Timur X), Anggota DPR RI Satori (F-NasDem, Jawa Barat VIII), Wakil

Ketua DPRD Cirebon, Rektor beserta jajaran civitas akademica Universitas Swadaya Gunung Jati, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Abdullah Syukur sebagai salah satu pemateri.

Sementara dari jajaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, turut hadir Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Helmizar, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Y.O.I Tahapary, dan jajaran Bagian Hubungan Masyarakat DPR RI. Dimiyati menegaskan,

mahasiswa sebagai generasi penerus harus menjadi pelopor dalam membawa perubahan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan hal lebih baik.

Sehingga, akan tercipta lingkungan yang bersih dan sehat untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. Politisi F-PKS ini juga berharap mahasiswa dapat menjadi transfer of knowledge kepada masyarakat luas tentang pentingnya menjaga keberlangsungan dan kelestarian lingkungan. “Kita harap mahasiswa ini turun ke masyarakat dalam bentuk KKN (Kuliah Kerja Nyata), sosialisasi agar mereka berkiprah untuk mendorong



masyarakat untuk bergotong royong dan paham lingkungan. Alam adalah lingkungan maka itu harus dijaga,” pesan legislator dapil Banten I itu.

Sementara itu, Rektor UGJ Cirebon Mukarto Siswoyo mengapresiasi diadakannya Parlemen Kampus di Cirebon. Menurutnya, ini salah bentuk kehadiran DPR di tengah-tengah masyarakat. Ia berharap, melalui diskusi interaktif seperti ini masyarakat dan mahasiswa agar lebih memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. “Salah satu permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia saat ini adalah plastik. Plastik telah membawa dampak negatif bagi

lingkungan kita, seperti banjir, pemicu pemanasan global, dan permasalahan lingkungan yang lainnya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Parlemen Kampus merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan atas kerja sama Bagian Humas, Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dengan sejumlah Universitas. Parlemen Kampus merupakan langkah untuk mendekatkan DPR RI dengan mahasiswa, sehingga diharapkan mahasiswa dapat mengetahui mekanisme rapat hingga proses pembentukan RUU yang berjalan di lembaga legislatif.

Foto : dpr.go.id

Bertemu Bupati Bekasi

Syaikhu Minta SDN Samudrajaya 04 Segera Diperbaiki

Saya berharap SDN 04 segera diperbaiki. Agar guru dan siswa nyaman dan aman belajar

H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar VII

Jakarta (31/01) -- Ahmad Syaikhu meminta Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja segera memperbaiki Gedung SDN 04 Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya yang sudah tidak layak.

Hal itu disampaikan Ahmad Syaikhu saat bertemu dengan Bupati Eka, Jum'at (31/1) di Kantor Pemkab Bekasi, Cikarang.

"Tolong Pak Bupati segera diperbaiki. Kondisinya sudah sangat tidak layak," ujar Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS itu.

Menanggapi permintaan Syaikhu, Bupati Eka menyatakan kesiapannya. "Sesegera mungkin akan dilakukan," jawab Eka.

Syaikhu sendiri sudah meninjau langsung SDN 04 Samudrajaya tersebut. Kondisinya memang sangat memprihatinkan.

Atap bangunan sudah banyak yang bolong. Lantai ruang kelas juga banyak yang beraslaskan tanah. Belum lagi jika banjir datang, kondisi sekolah semakin rusak.

"Saya berharap SDN 04 segera diperbaiki. Agar guru dan siswa nyaman dan aman belajar," pungkas Syaikhu.

Keterangan Foto

Atas : Ahmad Syaikhu saat bertemu Bupati Bekasi

Bawah : Ahmad Syaikhu saat meninjau SD Samudrajaya 04 beberapa waktu lalu



Nasir Jamil Minta Kerajaan Thailand Bebaskan ABK Asal Aceh

“Setelah ditangkap, lalu mereka (32 nelayan–red) kita ini dibawa dan didaratkan ke Pangkalan Angkatan Laut Wilayah III Tap Lamuk, Provinsi Phangnga, Thailand. Tapi kita yakin kondisi kesehatan mereka baik, bahkan sudah dikunjungi pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui Konsulat Republik Indonesia di Songkhla

H. M. NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota DPR RI Dapil Aceh II

Aceh (31/01) — Anggota DPR RI yang juga Ketua Forum Bersama (Forbes) DPR-RI/DPD-RI Asal Aceh mendesak Kerajaan Thailand, membebaskan seluruh anak buah kapal (ABK) bersama dua nahkoda KM Perkasa Mahera GT 95 dan KM Voltus GT 9, dari berbagai tuduhan dan tuntutan.

“Kita berharap 32 nelayan dari Aceh Timur yang kini ditahan di Thailand, dibebaskan dan segera di deportasi ke Indonesia,” ujar Ketua Forbes DPR-RI/DPD-RI Aceh, HM Nasir

Djamil, M.Si (foto) menjawab Waspada, Kamis (30/1).

Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, lanjut anggota Komisi III DPR-RI itu, setelah ditangkap sejak, Selasa (21/1) lalu, hingga saat ini mereka masih ditahan di Kantor Polisi Distrik Thai Mueang, Provinsi Phang Nga, Thailand.

“Apapun yang dilakukan nelayan kita di laut lepas dianggap aktivitas biasa dalam mencari nafkah,” kata politikus PKS ini.

Menurut Nasir Djamil,

minimnya alat navigasi di kapal dan pengaruh cuaca buruk dalam sebulan terakhir dianggap penyebab utama KM Perkasa Mahera dan KM Voltus bersama ke-32 nelayan asal Aceh Timur terseret hingga masuk ke perairan Phuket.

Disaat keluar dari batas perairan Indonesia dan masuk dalam wilayah Thailand, maka sudah sewajarnya pihak otoritas keamanan menangkap.

“Setelah ditangkap, lalu mereka (32 nelayan–red) kita ini dibawa dan didaratkan ke Pangkalan Angkatan Laut Wilayah III Tap Lamuk, Provinsi Phangnga, Thailand. Tapi kita yakin kondisi kesehatan mereka baik, bahkan sudah dikunjungi pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui Konsulat Republik Indonesia di Songkhla,” terang HM Nasir.

Ketidaksengajaan nelayan dalam melewati batas negara, lanjutnya, menjadi acuan pihaknya dalam mengharapkan pengampunan dari Kerajaan Thailand, agar ke-32 nelayan ini dibebaskan.

“Saat ini kita sedang



menjadwalkan pertemuan dengan Kedutaan Besar (Kedubes) Thailand di Jakarta. Nantinya kita berharap para nelayan ini segera dibebaskan,” tutur Nasir Djamil.

Perlu diketahui, Forbes yang kini diketuai Nasir Djamil, merupakan kumpulan anggota DPR-RI lintas partai yang berasal dari Dapil Aceh I dan Dapil Aceh II serta anggota DPR-RI dapil lainnya di Indonesia yang berdarah Aceh. Selain itu, dalam Forbes juga bergabung empat anggota DPD-RI asal

Aceh.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KM Mahera Perkasa GT 95 dan KM Voltus GT 9 dikabarkan ditangkap otoritas keamanan Thailand diperairan Phuket, Selasa (21/1) sekira pukul 08:00 Wib.

Mereka ditangkap atas dugaan beraktivitas di perairan Phuket, Thailand. Kedua kapal bersama puluhan nelayan asal Aceh Timur itu kini sudah didaratkan ke Phang Nga.

Foto : dpr.go.id



KOMISI IX

Upaya Iuran BPJS Kls. III Tidak Dinaikkan

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI H. Ansory Siregar, Lc bersama pimpinan DPR RI memimpin rapat dalam agenda Focus Group Discussion (FGD) "Mencairi Solusi Pembiayaan Selisih Biaya Kenaikan Iuran dan Pengawasan BPJS Kesehatan", di Nusantara II DPR RI, Selasa, 28 Januari 2020 FGD dihadiri pula Menkes, dirut BPJS Kesehatan, DJSN, Dewas BPJS Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan BPK.

BURT

Membuka Kegiatan Parlemen Kampus 2020

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah saat membuka acara Parlemen Kampus 2020 dengan tema "Darurat Pencemaran Lingkungan" yang bertempat di Auditorium Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ), Cirebon, Jawa Barat, Kamis (30/1).

Foto : dpr.go.id

KOMISI IX

Tinjau RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetyani dan Alifuddin hadir bersama Tim Komisi IX DPR RI meninjau RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara, untuk memastikan penanganan maupun pencegahan virus corona yang saat ini meresahkan masyarakat, Rabu, 29 Januari 2020. #Komisi9

Foto : dpr.go.id



KOMISI X

Tinjau LKP Brilliant College Indonesia

Anggota Komisi X DPR Dr. H. Fahmy Alaydroes, M.M.,M.Ed. turut serta bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi melakukan peninjauan lapangan ke Lembaga Kursus Kepelatihan (LKP) Brilliant College Indonesia di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis, 23 Januari 2020.

Foto/berita : dpr.go.id

BALEG

Kunjungan Baleg DPR Ke Untirta Serang

Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKS KH. Buchori, Lc., M.A. bersama Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan kunjungan ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Provinsi Banten dalam rangka sosialisasi Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, Senin, 27 Januari 2020.

Foto/berita : dpr.go.id

KOMISI v

Tinjau Bendungan Ciawi dan Sukamahi

Anggota Komisi V DPR RI Dari Fraksi PKS H. Ahmad Syaikhul dan H. Suryadi Jaya Purnama, S.T turut serta bersama Komisi V DPR RI meninjau proyek pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (23/1/2020).

Foto : Suparman dan dpr.go.id



KOMISI VII

Raker bahas Renstra 5 tahun

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto hadir dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM membahas Rencana Stretegis 5 Tahun Kedeapan, Implementasi Pepres No 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, dll pada Senin, 27 Januari 2020.

Foto/berita : dpr.go.id



DAPIL

SDN Samudrajaya 04 Diminta diperbaiki

Jakarta (31/01) —Annggota DPR RI Dapil Jabar VII H. Ahmad Syaikhul bertemu dengan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja pada Jum'at (31/1) di Kantor Pemkab Bekasi, Cikarang. Pada kesempatan tersebut Ahmad Syaikhul meminta Bupati Eka segera memperbaiki Gedung SDN 04 Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya yang sudah tidak layak. Syaikhul sendiri sudah meninjau langsung SDN 04 Samudrajaya tersebut. Kondisinya memang sangat memprihatinkan.



KOMISI v

FPKS dengan FNasdem bertemu kembali

Jakarta (301)-Pimpinan Fraksi PKS dan Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-Nasdem) bertemu membahas sejumlah persoalan terkini di Parlemen, diantaranya terkait Omnibus Law dan Pansus Jiwasraya. Hadir pada kesempatan tsb, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, Bendahara Fraksi Habib Aboe dan Wakil Ketua Fraksi Bidang Ekku Ecky Awal Muharam. Diterima oleh Wakil Ketua DPR RI asal Fraksi Nasdem Rahmat Gobel bersama sejumlah Anggota DPR RI.

PROFIL

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si



Keluarga Sumber energi yang tida pernah habis

Wow. Dah awal bulan, di tahun 2020 nih.

Udah berapa banyak resolusi yang tercapai? *Alhamdulillah ala kuli hal* kita semua sehat wal afiat. Kepada yang sakit semoga lekas pulih. Amiin

Pekan ini kita mau kenalan sama srikandah parlemen nih. Bu Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si bersama keluarga PKS. Anggota Fraksi PKS DPR RI dari Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur).

Anis Byarwati Lahir di ujung timur pulau Jawa, kota pahlawan Surabaya pada 9 Maret 1967. Doktor bidang Ilmu Ekonomi Islam ini moncer dalam urusan akademik, dunia yang tidak ditinggalkannya

meski saat ini sudah jadi anggota Parlemen. Buktinya, beliau adalah Iulusan Terbaik Program Pascasarjana Universitas Airlangga (Mahasiswa Program S3 Ilmu Ekonomi Islam) 2012.

Gak Cukup sampe disitu, Anggota Komisi XI ini pernah menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas YARSI Jakarta (2014-2017). Sempat di amanahkan sebagai Sekretaris Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI Jakarta (2017-2019). Namun beliau *resign* agar lebih fokus di DPR. Tidak mendua .

Hukum alam berkerja, satu amanah pergi yang lain datang. Saat ini diamanahi Direktur Lembaga Kajian Ketahanan

Keluarga Indonesia (LK3I) dan Ketua Majelis.Sarjana Ekonomi Islam (MASEI) Wilayah DKI Jakarta.

Beliau sangat vokal di ruang dewan, terkhusus untuk berbagai persoalan ekonomi dan good corporate governance (GCG). Saat ini saja jadi salah satu garda terdepan Anggota Fraksi PKS yang mendorong terungkapnya kasus Jiwasraya melalui pansus.

Sejumlah kesibukan di kampus dan kedewanan tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan adanya pengertian Keluarga. Dari suami Moh. K. Renwarin , Anis Byarwati memiliki 4 putra dan 4 putri. Komunikasi menjadi #clue penting dalam mengatur interaksi dengan seluruh anggota keluarga.

Pesan untuk keluarga Indonesia "Keluarga adalah harta yang paling berharga. Keluarga memberi kita sumber energi yang tak pernah habis. Bahagia kita bersama keluarga"

SOCMED

Untuk mengetahui semua kegiatan parlemen Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag, M.Si dapat mengikuti social media:

Facebook :
Anisbyarwatipks, Anis Byarwati

Twitter :
@AnisbyarwatiPKS

Instagram :
@anisbyarwatipks



”
Keluarga adalah harta yang paling berharga. Keluarga memberi kita sumber energi yang tak pernah habis. Bahagia kita bersama keluarga





Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

**KANAL RESMI
FRAKSI PKS
DPR RI**

fraksi.pks.id



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI